



Model Pengintegrasian Pendidikan Antikorupsi

Pada Mata Pelajaran
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)
Berdasarkan Kurikulum 2013 Edisi Revisi 2016

SMP/MTs Kelas IX





MILIK NEGARA
TIDAK DIPERDAGANGKAN

Model Pengintegrasian Pendidikan Antikorupsi

Pada Mata Pelajaran

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)

Berdasarkan Kurikulum 2013 Edisi Revisi 2016

SMP/MTs Kelas IX



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
PEMBINAAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN
Jakarta, 2017

PENYUSUN

I. Pengarah

1. Hamid Muhammad, Ph.D
Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
2. Dr. Thamrin Kasman
Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

II. Penulis

1. Dr. Achmad Husen, M.Pd
2. Drs. Supandi, M.Pd
3. Dr. Hj. Arnie F, M.Pd

III. Produksi

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah
Kegiatan Pembinaan Pendidikan Kewarganegaraan
Tahun Anggaran 2017

Edisi Revisi

Cetakan ke-8, 2017

ISBN 978-602-99299-3-5

KATA PENGANTAR

Pendidikan merupakan salah satu strategi yang efektif untuk menanamkan dan membina nilai-nilai karakter antikorupsi bagi peserta didik, pada jenjang pendidikan dasar. Mereka merupakan generasi yang akan mengganti generasi sekarang yang menduduki berbagai jabatan, baik di pemerintahan maupun swasta. Melalui pendidikan, proses perubahan sikap mental akan terjadi pada diri seseorang. Dengan perubahan tersebut, diharapkan generasi muda secara sadar mampu menerapkan dan mengimplementasikan sikap dan perilaku antikorupsi.


Penanaman nilai-nilai antikorupsi menjadi lebih efektif apabila dilakukan sejak dini, baik melalui pendidikan informal (keluarga), formal (persekolahan), dan nonformal (masyarakat). Penanaman nilai tersebut di persekolahan dilakukan melalui pengintegrasian pendidikan antikorupsi (PAk) dalam proses pembelajaran khususnya pada mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) sebagai pengembangan pembelajaran tematik.

Pendidikan antikorupsi yang diintegrasikan pada pembelajaran PPKn dilaksanakan di satuan pendidikan tingkat SMP/MTs secara berkelanjutan, ditekankan pada pembentukan sikap dan perilaku tanpa meninggalkan pengetahuan dan keterampilan, serta pengembangan keteladanan antikorupsi. Oleh karena itu, diperlukan perencanaan, pelaksanaan, serta penilaian proses dan hasil pembelajaran yang disusun berdasarkan peraturan yang berlaku.

Buku Model Pengintegrasian Pendidikan Antikorupsi ini disusun sebagai bahan dan panduan bagi guru, kepala sekolah, pengawas sekolah, dan Dinas Pendidikan dalam mengimplementasikan penanaman nilai-nilai antikorupsi pada pembelajaran PPKn berdasarkan kurikulum 2013 edisi revisi 2016, sehingga pendidikan antikorupsi di SMP/MTs dapat berlangsung secara efektif dan efisien. Dengan demikian, peserta didik lebih memahami makna tindakan koruptif, dan berani bersikap serta berperilaku antikorupsi.

Jakarta, Juni 2017

Direktur Jenderal
Pendidikan Dasar dan Menengah,



Hamid Muhammad, Ph.D
NIP. 195905121983111001

DAFTAR ISI

	Halaman
PENYUSUN	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Dasar Hukum	3
C. Tujuan dan Sasaran	4
D. Manfaat	5
E. Ruang Lingkup	6
BAB II KERANGKA KONSEPTUAL PENDIDIKAN ANTIKORUPSI	7
A. Pendidikan Antikorupsi sebagai Pendidikan Karakter	7
B. Dimensi dan Nilai-Nilai Pembentuk Karakter Antikorupsi	9
1. Dimensi Politik	9
2. Dimensi Sosiologi	10
3. Dimensi Ekonomi	11
4. Dimensi Hukum	12
BAB III TELAAH KOMPETENSI INTI DAN KOMPETENSI DASAR PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN (PPKn) SMP/MTs KELAS IX TERHADAP NILAI-NILAI KARAKTER ANTI-KORUPSI	15
BAB IV MODEL PENGINTEGRASIAN NILAI-NILAI ANTIKORUPSI KE DALAM MATA MATA PELAJARAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN (PPKn) KELAS IX	23
A. Pengintegrasian Nilai-nilai Antikorupsi dalam Kegiatan Intrakurikuler	23
B. Pengintegrasian Nilai-nilai Antikorupsi dalam Pengembangan Silabus	37
C. Pengintegrasian Nilai-nilai Antikorupsi dalam Pengembangan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)	50
BAB V PENUTUP	73
DAFTAR PUSTAKA	75

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 31 ayat (3) mengamanatkan bahwa pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan suatu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan Undang-undang. Atas dasar amanat tersebut, pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas).

UU Sisdiknas Pasal 2 menyatakan bahwa pendidikan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selanjutnya Pasal 3 menegaskan bahwa, "Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab."

Untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional tersebut, diperlukan profil kualifikasi kemampuan lulusan yang dituangkan dalam standar kompetensi lulusan. Penjelasan Pasal 35 UU Sisdiknas menyebutkan bahwa, "Standar kompetensi lulusan merupakan kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan peserta didik yang harus dipenuhinya atau dicapainya dari suatu satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah." Lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 54 Tahun 2013 dinyatakan bahwa, "Standar Kompetensi Lulusan terdiri atas kriteria kualifikasi kemampuan peserta didik yang diharapkan dapat dicapai setelah menyelesaikan masa belajarnya di satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah."

Kriteria kualifikasi kemampuan peserta didik untuk lulusan SMP/MTs pada aspek sikap (*attitude*) adalah memiliki perilaku yang mencerminkan sikap orang beriman, berakhlak mulia, berilmu, percaya diri, dan bertanggung jawab dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. Sedangkan aspek (*knowledge*) adalah memiliki pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif dalam ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab serta dampak fenomena dan kejadian, serta aspek keterampilan (*skill*) adalah memiliki kemampuan pikir dan tindak yang efektif dan kreatif dalam ranah abstrak dan konkret sebagai pengembangan dari yang dipelajari di sekolah secara mandiri.

Sementara itu, dalam kehidupan masyarakat saat ini dihadapkan pada kasus-kasus korupsi yang selalu muncul di depan mata. Hal ini dapat merusak generasi muda dan sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu pemerintah dengan dukungan masyarakat harus segera menata kurikulum pendidikan yang mampu menumbuhkan semangat antikorupsi dan pada akhirnya berani berkata, bersikap, dan bertindak antikorupsi.

Berkaitan dengan hal tersebut, UU Sisdiknas menyatakan bahwa “Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu”. Berdasarkan pengertian tersebut, kurikulum harus mampu menumbuhkan semangat dan berani berkata, bersikap, dan bertindak ANTIKORUPSI. Hal ini sejalan dengan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah, yaitu dengan diterbitkannya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, Inpres Nomor 17 tahun 2011 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi tahun 2012, Inpres Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, dan yang terakhir adalah Inpres Nomor 2 tahun 2014 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi tahun 2014. Khusus kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) diinstruksikan antara lain sebagaimana yang tertuang dalam Aksi ke-226: “Pengintegrasian pendidikan anti korupsi dalam kurikulum pendidikan dasar dan menengah.”

Sebagai tindak lanjut dari Inpres no. 5 tahun 2004, maka Kementerian Pendidikan Nasional melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah pada tahun 2009 membentuk Tim Teknis guna menyiapkan dan mengembangkan model pendidikan antikorupsi di sekolah. Hasil dari tim tersebut adalah buku Model Pengintegrasian Pendidikan Antikorupsi pada Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) SD/MI, SMP/MTs dan SMA/SMK/MA. Model pengintegrasian tersebut sudah disosialisasikan dan di diseminasikan ke sekolah-sekolah rintisan.

Sejalan dengan perubahan kurikulum Tahun 2013 edisi revisi 2016 dan beberapa peraturan pendukung yang berlaku, serta perubahan organisasi Kemdikbud yang dituangkan dalam Peraturan Presiden No. 14 Tahun 2015 dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, maka terjadi perubahan dari Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar menjadi Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah.

Berkaitan dengan hal tersebut Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah menyusun kembali Model Pengintegrasian Pendidikan Antikorupsi melalui Kegiatan Pembinaan Pendidikan Kewarganegaraan Tahun 2017 untuk satuan pendidikan tingkat SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA/SMK/MAK. Hasil penyempurnaan buku Model Pengintegrasian Pendidikan Antikorupsi pada Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) akan dipergunakan dalam kegiatan workshop dan diseminasi, yang dijadikan sebagai

dasar pembelajaran di sekolah.

Secara konseptual, dapat dikemukakan bahwa PPKn adalah pengorganisasian dari disiplin ilmu-ilmu sosial dan humaniora dengan penekanan pada pengetahuan dan kemampuan dasar tentang hubungan antar warganegara dan warganegara dengan negara yang dilandasi keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, nilai luhur dan moral budaya bangsa, memiliki rasa kebangsaan (nasionalisme) yang kuat dengan memperhatikan keragaman agama, sosiokultural, bahasa, dan suku bangsa, dan memiliki jiwa demokratis yang diharapkan dapat diwujudkan dalam perilaku sehari-hari. Dengan kata lain bahwa materi/konten PPKn di Indonesia terdiri dari beberapa disiplin ilmu yang memerlukan pengorganisasian materi secara sistematis dan pedagogik, seperti ilmu hukum, politik, tatanegara, humaniora, moral Pancasila, psikologi, nilai-nilai budi pekerti dan disiplin ilmu lainnya (Fajar, Arnie: Tesis 2003). Dengan demikian secara substansi mata pelajaran PPKn terbuka terhadap perubahan dan dinamika yang berkembang dalam kehidupan masyarakat dan negara termasuk mewadahi berbagai masalah faktual khususnya penanaman nilai-nilai antikorupsi.

PPKn merupakan salah satu muatan wajib dalam kurikulum pendidikan dasar dan menengah sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Selain itu, PPKn sebagai salah satu mata pelajaran yang mampu memberikan kontribusi dalam solusi atas berbagai krisis yang melanda Indonesia, terutama krisis multidimensional. PPKn memiliki peran mengembangkan nilai-nilai Pancasila yang diharapkan mampu membudayakan dan memberdayakan peserta didik agar menjadi warganegara yang cerdas dan baik serta menjadi pemimpin bangsa dan negara Indonesia di masa depan yang amanah, jujur, cerdas, dan bertanggungjawab. Adapun fungsi PPKn adalah sebagai mata pelajaran yang memiliki misi pengokohan kebangsaan dan penggerak pendidikan karakter; dalam hal ini adalah karakter antikorupsi.

Korupsi dalam konteks pendidikan adalah tindakan untuk mengendalikan atau mengurangi serta mencegah sebelum ada niat (*pre-emptif*) dan sudah ada niat (*preventif*) untuk tidak melakukan korupsi. Karena itu pendidikan antikorupsi dimaksud merupakan keseluruhan upaya untuk mendorong generasi-generasi mendatang mengembangkan sikap menolak secara tegas setiap bentuk tindakan korupsi. Pendidikan Antikorupsi sangat penting dilakukan melalui jalur pendidikan, karena pendidikan adalah usaha sadar untuk merubah perilaku seseorang, termasuk peserta didik calon pemimpin masa depan (*students are today, leaders are tomorrow*) dengan harapan agar generasi muda secara sadar mampu membangun sistem nilai antikorupsi yang melekat pada jiwa dan karakter antikorupsi pada dirinya.

B. Dasar Hukum.

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

- b. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- c. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan.
- e. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 (Stranas PPK) .
- f. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.
- g. Inpres Nomor 17 tahun 2011 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi tahun 2012.
- h. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2013 tentang Aksi Percepatan Pemberantasan Korupsi.
- i. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2014 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2014.
- j. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2015.
- k. Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan Tahun 2017 untuk pemerintah pusat Kementerian/Lembaga/Instansi/Pemerintah Daerah.
- l. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Buku Yang Digunakan Oleh Satuan Pendidikan.
- m. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 20 Tahun 2016 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah.
- n. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 21 Tahun 2016 tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah.
- o. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah.
- p. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 23 Tahun 2016 tentang Standar Penilaian Pendidikan.
- q. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 24 Tahun 2016 tentang Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar Pelajaran pada Kurikulum 2013 pada Pendidikan dasar dan Menengah.

C. Tujuan dan Sasaran

Buku Model Pengintegrasian Pendidikan Antikorupsi pada mata pelajaran PPKn ini sebagai panduan bagi:

- a. Guru SMP/MTs dalam :
 - 1) menelaah kompetensi inti dan kompetensi dasar mata pelajaran PPKn yang dapat diintegrasikan nilai-nilai antikorupsi;

- 2) mengintegrasikan nilai-nilai antikorupsi ke dalam materi pembelajaran PPKn;
 - 3) mengintegrasikan nilai-nilai antikorupsi ke dalam silabus mata pelajaran PPKn;
 - 4) mengintegrasikan nilai-nilai antikorupsi ke dalam Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) mata pelajaran PPKn dan;
 - 5) mengimplementasikan pendidikan antikorupsi dalam mata pelajaran PPKn.
- b. Kepala SMP/MTs:
- 1) sebagai acuan untuk melakukan supervisi klinis terhadap guru PPKn dalam mengimplementasikan pembelajaran PPKn SMP/MTs yang terintegrasi nilai-nilai antikorupsi;
 - 2) sebagai acuan untuk perencanaan, pelaksanaan dan penilaian pembelajaran PPKn SMP/MTs yang terintegrasi nilai-nilai antikorupsi dan;
 - 3) sebagai acuan dalam rangka sosialisasi pendidikan antikorupsi terhadap guru dan komite sekolah di lingkungan sekolahnya;
- c. Pengawas sekolah SMP/MTs.
- 1) sebagai acuan penyusunan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan monitoring implementasi pembelajaran PPKn SMP/MTs yang terintegrasi nilai-nilai antikorupsi.
 - 2) acuan supervisi akademik pembelajaran PPKn SMP/MTs yang terintegrasi nilai-nilai antikorupsi.
 - 3) acuan evaluasi dan monitoring keterlaksanaan pembelajaran PPKn SMP/MTs. yang terintegrasi nilai-nilai antikorupsi.
- d. Bagi Dinas Pendidikan:
1. sebagai acuan penyusunan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan monitoring program diseminasi model pengintegrasian pendidikan antikorupsi melalui mata pelajaran PPKn SMP/MTs di daerah kabupaten/kota;
 2. sebagai acuan dalam menyusun program anggaran daerah kabupaten/kota dalam mengimplementasikan Pendidikan Antikorupsi.

D. Manfaat

Setelah menggunakan model ini, guru, kepala sekolah, pengawas sekolah, dan dinas pendidikan dapat melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

1. Membangun kehidupan sekolah sebagai lingkungan bebas dari korupsi dengan mengembangkan kebiasaan (*habit*) antikorupsi dalam kehidupan sehari-hari.
2. Membina warga sekolah agar memiliki kompetensi seluruh dimensi kewarganegaraan, yakni: (a) sikap kewarganegaraan termasuk keteguhan, komitmen dan tanggung jawab kewarganegaraan (*civic confidence, civic commitment, and civic responsibility*); (b) pengetahuan kewarganegaraan; (c) keterampilan kewarganegaraan termasuk kecakapan dan partisipasi kewarganegaraan (*civic competence and civic responsibility*).

3. Meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan di sekolah melalui pendidikan antikorupsi yang diintegrasikan secara sistematis dan sistemik dalam mata pelajaran PPKn.

E. Ruang lingkup

Ruang lingkup model ini berpijak pada pemahaman korupsi yang ditinjau dari dimensi politik, sosiologi, ekonomi, dan hukum yang dikemas secara pedagogis. Pengembangan model pengintegrasian Pendidikan Antikorupsi pada mata pelajaran PPKn mencakup hal-hal sebagai berikut:

1. Telaah kompetensi inti dan kompetensi dasar mata pelajaran PPKn yang dapat diintegrasikan nilai-nilai antikorupsi.
2. Pengintegrasian aspek dan nilai-nilai antikorupsi ke dalam materi pembelajaran PPKn.
3. Pengintegrasian nilai-nilai antikorupsi ke dalam silabus mata pelajaran PPKn.
4. Pengintegrasian nilai-nilai antikorupsi ke dalam Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) mata pelajaran PPKn.
5. Implementasi pendidikan antikorupsi dalam mata pelajaran PPKn.

BAB II

KERANGKA KONSEPTUAL PENDIDIKAN ANTIKORUPSI

A. Pendidikan Antikorupsi sebagai Pendidikan Karakter

Karakter adalah watak, perilaku dan budi pekerti yang menjadi ruh dalam pendidikan. Dengan demikian diperlukan suatu gerakan untuk melakukan Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) melalui harmonisasi olah hati (etik), olah rasa (estetik), olah pikir (literasi), dan olah raga (kinestetik), (Kemdikbud, 2016: iii). Melalui harmonisasi olah hati, olah rasa, olah pikir, dan olah raga tersebut, diharapkan dapat mengubah sosok pribadi bangsa Indonesia dalam cara berpikir, cara bertindak, dan berperilaku menjadi lebih baik dan berintegritas.

Pendidikan karakter sebenarnya bukan hal yang baru. Pendidikan karakter sudah pernah diluncurkan sebagai gerakan nasional pada 2010. Namun, gema gerakan pendidikan karakter ini belum terasa sampai sekarang. Karena itu, pendidikan karakter perlu digaungkan dan diperkuat kembali menjadi gerakan nasional pendidikan karakter bangsa melalui program nasional Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) dalam lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan menjadi sarana strategis bagi pembentukan karakter bangsa karena memiliki struktur, sistem dan perangkat yang tersebar di seluruh Indonesia dari daerah sampai pusat. Pembentukan karakter bangsa ini dilaksanakan secara masif dan sistematis melalui program Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) yang terintegrasi dalam keseluruhan sistem pendidikan, budaya sekolah dan dalam kerjasama dengan komunitas. (Kemendikbud, 2016: 1).

Tujuan program PPK adalah menanamkan nilai-nilai pembentukan karakter bangsa secara masif dan efektif melalui implementasi nilai-nilai utama Gerakan Nasional Revolusi Mental (religius, nasionalis, mandiri, gotong-royong dan integritas) yang akan menjadi fokus pembelajaran, pembiasaan dan pembudayaan, sehingga pendidikan karakter bangsa sungguh dapat mengubah perilaku, cara berpikir dan cara bertindak seluruh bangsa Indonesia menjadi lebih baik dan berintegritas.

Kata integritas berasal dari bahasa Inggris yakni *integrity*, yang berarti menyeluruh, lengkap atau segalanya. Integritas dapat diartikan sebagai konsistensi dan keteguhan yang kuat dalam menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dan keyakinan, merupakan suatu konsep yang menunjuk konsistensi antara tindakan dengan nilai-nilai, kode etik, dan prinsip. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) *online*, (2017) "integritas adalah mutu, sifat, atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan; kejujuran; wujud keutuhan prinsip moral dan etika bangsa dalam kehidupan bernegara". Berdasarkan uraian tersebut dapat dikatakan bahwa pada prinsipnya seseorang yang berintegritas adalah seseorang yang menerapkan

prinsip “*satunya kata dengan perbuatan*”, seperti kata yang mencakup nilai dan sifat bertanggung jawab, jujur, konsekuen, komitmen, mengutamakan kebenaran, adil, disiplin, mandiri, kebersamaan, dan bijaksana.

Pendidikan antikorupsi merupakan bagian atau irisan dari pendidikan karakter, yang lebih fokus untuk mengembangkan nilai-nilai antikorupsi. Nilai-nilai antikorupsi berfungsi untuk mengarahkan, mengendalikan, dan menentukan kelakuan seseorang, karena nilai dijadikan standar perilaku yang baik. Menurut KBBI *online* 2017, “nilai diartikan sebagai pribadi yang utuh, misalnya kejujuran; nilai yang berhubungan dengan akhlak; nilai yang berkaitan dengan benar dan salah yang dianut oleh golongan atau masyarakat”. Oleh karena itu pembinaan pengembangan nilai-nilai antikorupsi melalui pendidikan merupakan wahana untuk mensosialisasikan dan menginternalisasikan nilai-nilai antikorupsi dalam diri seseorang agar menjadi sikap dan perilaku antikorupsi. Antikorupsi dilihat dalam konteks pendidikan adalah tindakan untuk mengendalikan atau mengurangi korupsi, merupakan keseluruhan upaya untuk mendorong generasi-generasi mendatang mengembangkan sikap menolak secara tegas setiap bentuk tindak korupsi (Buchori, Muchtar, 2007).

Pemerintah telah melakukan berbagai upaya dalam memberantas korupsi dengan penetapan berbagai peraturan perundang-undangan, namun belum menampakkan hasil yang optimal. Oleh karena itu diperlukan terobosan dengan cara pencegahan, yaitu dengan membangun filosofi berupa penyemaian nalar dan nilai-nilai yang bebas dari korupsi melalui jalur pendidikan. Jalur pendidikan memiliki posisi sangat vital dalam upaya membangun sikap dan perilaku antikorupsi, khususnya sektor pendidikan formal diharapkan dapat berperan dalam memenuhi kebutuhan pencegahan korupsi sebagai *preventive strategi*. Dalam hal ini peserta didik dijadikan sebagai target sekaligus diberdayakan sebagai penekan lingkungan agar tidak *permissive to corruption* dan bersama-sama bangkit melawan korupsi.

Agar sikap dan perilaku antikorupsi dapat menjadi karakter peserta didik, maka pendidikan antikorupsi melalui pendidikan formal di sekolah harus diorientasikan pada tataran *moral action*, agar peserta didik tidak hanya berhenti pada kompetensi (*competence*) saja, tetapi sampai memiliki kemauan (*will*), dan kebiasaan (*habit*) dalam mewujudkan nilai-nilai dalam kehidupan sehari-hari. Lickona (1991), menyatakan bahwa untuk mendidik moral anak sampai pada tataran moral action diperlukan tiga proses pembinaan yang berkelanjutan mulai dari proses *moral knowing*, *moral feeling*, hingga sampai pada *moral action*. Ketiganya harus dikembangkan secara terpadu dan seimbang. Dengan demikian diharapkan potensi peserta didik dapat berkembang secara optimal, baik pada aspek kecerdasan intelektual, yaitu memiliki kecerdasan, kemampuan membedakan yang baik dan buruk, benar dan salah, serta menentukan mana yang bermanfaat. Kecerdasan emosional, berupa kemampuan mengendalikan emosi, menghargai dan mengerti perasaan orang lain, dan mampu bekerja dengan orang lain. Kecerdasan sosial, yaitu memiliki

kemampuan berkomunikasi, senang menolong, berteman, senang bekerja sama, senang berbuat untuk menyenangkan orang lain. Kecerdasan spritual, yaitu memiliki kemampuan iman yang anggun, merasa selalu diawasi oleh Allah, gemar berbuat baik karena lillahi ta'alah, disiplin beribadah, sabar, ikhtiar, jujur, pandai bersyukur dan berterima kasih. Sedangkan kecerdasan kinestetik, adalah menciptakan keperdulian terhadap dirinya dengan menjaga kesehatan jasmani, tumbuh dari rizki yang hahal, dan sebagainya. Maka sosok manusia yang mengembangkan berbagai kecerdasan tersebut, diharapkan siap menghadapi dan memberantas perbuatan korupsi atau bersikap antikorupsi.

B. Dimensi dan Nilai-nilai Pembentuk Karakter Antikorupsi

Korupsi tidak hanya mempunyai dimensi formal sebagaimana yang dideskripsikan oleh KPK, namun juga memiliki dimensi politis, sosiologis, ekonomi, dan pegagogis. Meskipun korupsi bersifat multidimensi, persamaan yang mendasari perbedaan dimensi tersebut adalah etika. Korupsi merupakan suatu tindakan yang menyimpang dan melanggar etika serta merugikan pihak lain.

Berikut disajikan empat dimensi korupsi yang bukan merupakan dimensi formal, dan saling melengkapi antara satu dengan lainnya.

1. Dimensi Politik

Salah satu prosedur kelembagaan untuk mencapai keputusan politik adalah demokrasi. Untuk memperoleh suatu keputusan yang demokratis, suatu lembaga harus mengikutsertakan individu untuk memberikan aspirasi. Berdasarkan aspirasi tersebut, setiap individu berhak bersaing dengan sehat dan rasional untuk mendapatkan suara rakyat, misalnya hak setiap individu untuk berkampanye dalam rangka pemilihan umum yang bertujuan untuk mendapatkan simpati dan pengikut yang dapat mendukungnya. Berkaitan dengan hal ini, Schumpeter (1947: 5) mengemukakan tentang teori demokrasi yang disebut dengan "Metode Demokratis", yaitu prosedur kelembagaan untuk mencapai keputusan politik yang di dalamnya individu memperoleh kekuasaan untuk membuat keputusan melalui perjuangan kompetitif dalam rangka memperoleh suara rakyat.

Dari sisi korupsi, terdapat model kompetisi *clientelistic*, yaitu kompetisi dengan iming-iming materi dan bentuk varian lainnya (*direct payment*) untuk menarik simpati pemilih secara perorangan atau kelompok kecil dalam masyarakat. Model ini akan memberikan tekanan besar terhadap penyimpangan dana publik dan kian memperkuat struktur korupsi mulai dari bentuk penggunaan dana dan sarana publik untuk memperluas basis pendukung pada saat pemilu (*pork-barrel spending*), alokasi program pemerintah ke basis konstituen partai (*allocational policies*), hingga melanggengkan relasi patronase politik dan bisnis. Dalam kondisi demikian, korupsi mempersulit demokrasi dan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) dengan cara menghancurkan proses

formal.

Korupsi di pemilihan umum dan di badan legislatif mengurangi akuntabilitas dan perwakilan dalam pembentukan kebijaksanaan. Korupsi politis berarti kebijaksanaan pemerintah sering menguntungkan pemberi suap bukan kepada rakyat luas, misalnya ketika politikus membuat peraturan yang melindungi perusahaan besar, namun merugikan perusahaan-perusahaan kecil. Politikus-politikus "pro-bisnis" ini hanya mengembalikan pertolongan kepada perusahaan besar yang memberikan sumbangan besar kepada kampanye pemilu mereka. Korupsi politis semacam ini terjadi di banyak negara dan memberikan ancaman besar bagi warga negaranya. Secara umum, korupsi mengikis kemampuan institusi dari pemerintah, karena pengabaian prosedur, penyedotan sumber daya, dan pejabat diangkat atau dinaikan jabatan bukan karena prestasi. Pada saat yang bersamaan, korupsi mempersulit legitimasi pemerintahan dan nilai demokrasi seperti kepercayaan dan toleransi.

2. Dimensi Sosiologi

Pada prinsipnya sosiologi merupakan cabang Ilmu Sosial yang mempelajari masyarakat dan pengaruhnya terhadap kehidupan manusia, meliputi sifat, perilaku, dan perkembangan masyarakat dalam arti pembangunan. Allan Jhonson (Wikipedia, ensiklopedia bebas-Sosiologi 23/02/2008), mengemukakan bahwa sosiologi adalah ilmu yang mempelajari kehidupan dan perilaku, terutama dalam kaitannya dengan suatu sistem sosial dan bagaimana sistem tersebut mempengaruhi orang dan bagaimana pula orang yang terlibat didalamnya mempengaruhi sistem tersebut.

Manusia sebagai makhluk sosial, dalam kehidupan bermasyarakat sangat membutuhkan keberadaan orang lain dengan mengadakan hubungan sosial. Hubungan sosial tersebut dapat terjadi karena adanya kontak dan interaksi dari berbagai perilaku manusia, inilah yang disebut sebagai interaksi sosial. Berkaitan dengan hal tersebut, perbuatan korupsi merupakan salah satu konsekuensi dari interaksi antar individu baik dalam bentuk individu maupun kelompok yang merupakan wujud dari penyimpangan sosial. Ketika salah satu pihak melakukan suatu tindakan penyimpangan dan tindakan menyimpang tersebut merugikan pihak lain, maka tindakan individu atau kelompok tersebut dapat dikatakan sebagai suatu tindakan korupsi.

Penyimpangan sosial dapat dilakukan secara individu (*individual deviation*), yaitu tindak kejahatan atau kerusakan dengan tidak peduli terhadap peraturan atau norma yang berlaku secara umum dalam lingkungan masyarakat sehingga menimbulkan kerugian, keresahan, ketidakamanan, ketidaknyamanan atau bahkan menyakiti. Sedangkan penyimpangan yang berbentuk kelompok atau kolektif (*group deviation*) merupakan suatu perilaku menyimpang yang dilakukan oleh kelompok orang secara bersama-sama dengan melanggar norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Akibat yang ditimbulkannya sama dengan penyimpangan yang dilakukan secara individu. Bentuk

penyimpangan sosial secara kelompok dapat terjadi dengan adanya pergaulan atau pertemanan sekelompok orang yang menimbulkan solidaritas antar anggotanya sehingga mau tidak mau terkadang harus ikut dalam tindak kejahatan kelompok. Hal ini biasanya dilakukan secara sembunyi-sembunyi maupun terbuka, seperti merampok, menjajah, melakukan korupsi, sindikat curanmor dan lain-lain.

Dengan adanya penyimpangan sosial tersebut perlu adanya pengendalian sosial, yaitu suatu upaya yang ditempuh sekelompok orang atau masyarakat melalui mekanisme tertentu untuk mencegah dan meluruskan anggota masyarakat yang berperilaku menyimpang/membangkang serta mengajak dan mengarahkannya untuk berperilaku dan bersikap sesuai norma dan nilai yang berlaku. Pengendalian sosial tersebut dapat dilaksanakan melalui jalur hukum (yang harus kita lakukan), norma-norma (yang biasanya kita lakukan), dan petunjuk moral (yang seharusnya kita lakukan).

Soerjono Soekanto (www.dikmenum.go.id 1. 08/07/2008), menyatakan bahwa pengendalian sosial adalah suatu proses baik yang direncanakan atau tidak direncanakan, yang bertujuan untuk mengajak, membimbing atau bahkan memaksa warga masyarakat agar mematuhi nilai-nilai dan kaidah-kaidah yang berlaku. Dengan demikian, pengendalian sosial meliputi proses sosial yang direncanakan maupun tidak direncanakan (spontan) untuk mengarahkan seseorang atau kelompok orang. Selain itu pengendalian sosial pada dasarnya merupakan sistem dan proses yang mendidik, mengajak dan bahkan memaksa warga masyarakat untuk berperilaku sesuai dengan norma-norma sosial.

Berkaitan dengan korupsi yang merupakan salah satu bentuk penyimpangan sosial, maka dalam hal ini perlu dilakukan pengendalian sosial melalui system mendidik dan mengarahkan melalui mekanisme tertentu. Mendidik dimaksudkan agar dalam diri seseorang terdapat perubahan sikap dan tingkah laku untuk bertindak sesuai dengan norma-norma yang berlaku yaitu bersikap anti-korupsi. Mengajak bertujuan mengarahkan agar perbuatan seseorang didasarkan pada norma-norma yang berlaku dan tidak menurut kemauan individu-individu atau kelompok yang melakukan korupsi.

3. Dimensi Ekonomi

Korupsi mempersulit pembangunan ekonomi dan mengurangi kualitas pelayanan pemerintahan antara lain dengan membuat distorsi (kekacauan) dan ketidak efisienan yang tinggi. Sebagai contoh dalam sektor privat, korupsi meningkatkan ongkos niaga karena kerugian dari pembayaran ilegal, ongkos manajemen dalam negosiasi dengan pejabat korup. Walaupun terdapat pendapat yang menyatakan bahwa korupsi mengurangi ongkos (niaga) dengan mempermudah birokrasi. Sedangkan di sektor publik korupsi menimbulkan distorsi dengan mengalihkan investasi publik ke proyek-proyek masyarakat dimana suap dan upah tersedia lebih banyak. Baik di sector privat maupun publik, dimungkinkan pejabat membuat aturan-aturan baru dan hambatan baru

sebagai tambahan kompleksitas proyek masyarakat untuk menyembunyikan praktek korupsi. Hal ini mengakibatkan lebih banyak kekacauan. Korupsi juga mengurangi pemenuhan syarat-syarat keamanan bangunan, lingkungan hidup, atau aturan-aturan lain. Korupsi juga mengurangi kualitas pelayanan pemerintahan dan infrastruktur; serta menambahkan tekanan-tekanan terhadap anggaran pemerintah.

Korupsi di bidang ekonomi juga menyebabkan persaingan yang tidak kompetitif antar pelaku ekonomi (pengusaha) karena semua proses harus melalui uang pelicin dan memerlukan waktu yang relative lama. Hal ini mengakibatkan munculnya kekacauan "lapangan perniagaan". Perusahaan yang memiliki koneksi dilindungi dari persaingan dan sebagai hasilnya mempertahankan perusahaan-perusahaan yang tidak efisien. Sedangkan bagi masyarakat bawah, korupsi menimbulkan biaya hidup yang lebih tinggi dan harga-harga menjadi lebih mahal sebagai dampak adanya "ongkos manajemen" seperti dipaparkan di atas. Akibatnya muncul banyak pengemis, penganguran, pemerasan, hingga pembunuhan yang sumber utamanya adalah uang untuk memenuhi kebutuhan dan mempertahankan hidup. Inilah yang menyebabkan korupsi dikualifikasikan sebagai pelanggaran Hak Ekonomi.

4. Dimensi Hukum

Keberhasilan pemerintah dan kekuasaan suatu Negara seperti Indonesia adalah bagaimana kebijakan negara mencegah dan memberantas korupsi secara optimal, masalah korupsi pada dasarnya tidak bersandar pada legitimasi hukum saja, tetapi terkait dengan aspek ekonomi, sosial dan politik. Seno Adji (2009) berpendapat bahwa korupsi di Indonesia sudah tersistem (*systemic corruption*) yang melibatkan kelembagaan yang dikategorikan sebagai penyakit yang sulit pembuktiannya bahkan lekat sekali dengan kekuasaan. Sistem harus ditelaah sebagai kesatuan yang meliputi tindakan re-evaluasi, reposisi, dan pembaharuan struktur, substansi hukum khususnya budaya hukum sebagai cermin etika dan integritas penegakan hukum. Budaya hukum merupakan aspek penting yang melihat bagaimana masyarakat menganggap ketentuan sebagai *civic-minded*, sehingga masyarakat selalu taat dan menyadari betapa pentingnya hukum sebagai regulasi.

Praktek korupsi di Indonesia lebih transparan setelah berbagai kasus yang menimpa para politikus secara beruntun terkuak, meskipun dalam penyelesaiannya masih terdapat kendala karena kompleksitas dan keluasan aspek serta konspirasinya. Menurut Laila (2009) paling tidak ada tiga relasi konspirasi yang melakukan intervensi saling menguntungkan terhadap proyek-proyek atau berbagai kegiatan. *Pertama*, antar pejabat dalam suatu instansi pemerintah maupun antar instansi, termasuk di dalamnya melibatkan pejabat di bidang keamanan (militer dan kepolisian). *Kedua*, antara pejabat dengan pengusaha, dimana para pengusaha karena sudah memiliki jaringan di dalam dan benar-benar mengetahui apa yang dimaui para pejabat itu, selalu saja survive

kendati terjadi pergantian pejabat dalam lingkungan birokrasi. *Ketiga*, antara pengusaha dengan pengusaha. Relasi terakhir biasanya terjadi dalam proses tender proyek, dimana diantara mereka sudah saling mengerti untuk sama “memperoleh jatah” dengan saling membantu atau tidak saling mengganjal. Wujudnya antara lain “pendamping” dalam proses tender tertentu, dimana sang pendamping itu juga sekaligus memperoleh “bagian atau prosentase” dari sang pemenang, sehingga pelaksanaan tender sebenarnya hanya formalitas dan akal-akalan saja.

Dari sudut pandang hukum, tindak pidana korupsi secara garis besar mencakup unsur-unsur sebagai berikut:

1. Perbuatan melawanhukum;
2. Penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana;
3. Memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi;
4. Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Selain itu terdapat beberapa jenis tindak pidana korupsi yang lain, diantaranya:

1. Memberi atau menerima hadiah atau janji (penyuapan);
2. Penggelapan dalam jabatan;
3. Pemerasan dalam jabatan;
4. Ikut serta dalam pengadaan (bagi pegawai negeri/penyelenggara negara);
5. Menerima gratifikasi (bagi pegawai negeri/penyelenggara negara).

Berdasarkan empat dimensi tersebut, dianalisa beberapa indikator untuk masing-masing dimensi. Selanjutnya dari indikator itu dikembangkan menjadi instrumen penelitian sehingga menghasilkan berbagai nilai antikorupsi yang selanjutnya dinamakan nilai acuan. Dimensi, Indikator, dan Nilai Acuan tersebut disajikan dalam tabel berikut:

PENDIDIKAN ANTIKORUPSI	
DIMENSI DAN INDIKATOR	NILAI ACUAN
1. Politik: <ol style="list-style-type: none"> a. Membuat kebijakan didasarkan pada kepentingan umum/bersama (adil, berani) b. Melaksanakan kebijakan didasari pada sikap menjunjung tinggi kebenaran (jujur, berani) c. Melaksanakan pengawasan kebijakan secara tidak tebang pilih (adil, berani) d. melaksanakan musyawarah dalam menyelesaikan masalah (kebersamaan) 2. Sosiologi: <ol style="list-style-type: none"> a. Menepati janji (tanggung jawab) b. Tidak diskriminatif dalam memberikan layanan (adil) c. Tidak nepotisme (adil, mandiri) d. Tidak kolusi (jujur, mandiri) e. melaksanakan 	<p>KESETARAAN: kesejajaran, sama tingkatan/kedudukan, sebanding, sepadan, seimbang.</p> <p>KEBERSAMAAN: hal bersama, seperti rasa persaudaraan/kekeluargaan, senasib sepenanggungan, dan merasa menjadi satu kesatuan (integritas),</p> <p>KOMITMEN: Perjanjian, keterikatan untuk melakukan sesuatu (yang telah disepakati), kontrak.</p> <p>KONSEKUEN: Sesuai dengan apa yang dikatakan/diperbuat, berwatak teguh, tidak menyimpang dari apa yang sudah diputuskan</p> <p>KEPEMILIKAN: perihal kepemilikan</p> <p>HEMAT: berhati-hati dalam membelanjakan uang, tidak boros, cermat.</p> <p>BIJAKSANA: selalu menggunakan akal budinya (pengalaman dan pengetahuannya), arif,</p>

PENDIDIKAN ANTIKORUPSI	
DIMENSI DAN INDIKATOR	NILAI ACUAN
f. membunikan g. berpartisipasi h. melaksanakan 3. Ekonomi: a. Melakukan persaingan secara sehat (tanggung jawab, jujur, kerja keras) b. Tidak menyuap (jujur) c. Tidak boros dalam menggunakan sumber daya (sederhana, tanggung jawab) d. Tidak melakukan penyimpangan alokasi dan distribusi (jujur, peduli, tanggung jawab) 4. Hukum: a. Tidak melakukan penggelapan dana, pajak, barang, dan sebagainya (jujur, tanggung jawab) b. Tidak melakukan pemalsuan dokumen, surat, tanda tangan, dan sebagainya (jujur, tanggung jawab) c. Tidak melakukan pencurian dana, barang, waktu, ukuran yang merugikan pihak lain, dan sebagainya (jujur, tanggung jawab, disiplin) d. Tidak melakukan penipuan terhadap pihak lain (jujur) e. Tidak melakukan persekongkolan dalam membuat putusan (tanggung jawab) f. Tidak melakukan kerusakan terhadap barang/fasilitas milik negara (tanggung jawab, peduli) g. Tidak memberikan atau menerima gratifikasi (jujur, sederhana) h. Tidak menyalahi/melanggar aturan (disiplin, tanggung jawab) i. melaksanakan keputusan dengan penuh tanggung jawab (komitmen)	tajam pikiran, pandai dan hati-hati (cermat, teliti, dsb.) IKHLAS: bersih hati, tulus hati. BERBAGI: membagi sesuatu bersama, membagi diri, saling memberi pengalaman. RAJIN: suka bekerja (belajar dsb.), tekun, sungguh2 bekerja, selalu berusaha giat, terus menerus. SPORTIF: bersifat kesatria, jujur, tegak (tetap pendirian, tetap memegang keadilan). TANGGUNG JAWAB: keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dsb. Misalnya berani dan siap menerima resiko, amanah, tidak mengelak, dan berbuat yang terbaik), hak fungsi menerima pembebanan sebagai akibat sikap pihak sendiri atau pihak lain, melaksanakan dan menyelesaikan tugas dengan sungguh-sungguh. DISIPLIN: tata tertib, ketaatan (kepatuhan) pada peraturan, tepat waktu, tertib, dan konsisten. JUJUR: lurus hati, tidak curang, tulus, dapat dipercaya, berkata dan bertindak benar, mengungkapkan sesuatu sesuai dengan kenyataan (tidak berbohong), dan punya niat yang lurus terhadap setiap tindakan. SEDERHANA: bersahaja, sikap dan perilaku yang tidak berlebihan, tidak banyak seluk-beluknya, tidak banyak pernik, lugas, apa adanya, hemat, sesuai kebutuhan, dan rendah hati. KERJA KERAS: kegiatan melakukan sesuatu dengan sungguh-sungguh, pantang menyerah/ulet dan semangat dalam berusaha. MANDIRI: dalam keadaan dapat berdiri sendiri, tidak bergantung dengan orang lain, percaya pada kemampuan diri sendiri, mampu mengatur dirinya sendiri, dan mengambil inisiatif. ADIL: sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak /tidak pilih kasih, berpihak/berpegang kepada kebenaran, sepatutnya, tidak sewenang-wenang, seimbang, netral, objektif dan proporsional. BERANI: mempunyai hati yang mantap dan rasa percaya diri yang besar dalam menghadapi bahaya, kesulitan, dsb. (Tidak takut, gentar, kecut) dan pantang mundur. PEDULI: mengindahkan, memperhatikan (empati), menghiraukan, menolong, toleran, setia kawan, membela, memahami, menghargai, dan memperlakukan orang lain sebaik-baiknya.

BAB III

TELAHAH KOMPETENSI INTI DAN KOMPETENSI DASAR PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN (PPKn) SMP/MTs KELAS IX TERHADAP NILAI-NILAI ANTIKORUPSI

Kurikulum 2013 memuat Standar Kompetensi Lulusan (SKL), yang diatur dalam Permendikbud Nomor 20 Tahun 2016, dijabarkan menjadi 4 (empat) kompetensi inti (KI), yaitu: sikap spiritual (KI-1), sikap sosial (KI-2), pengetahuan (KI-3), dan keterampilan (KI-4). Masing-masing kompetensi inti dijabarkan ke dalam sejumlah kompetensi dasar (KD) sesuai dengan Permendikbud Nomor 24 Tahun 2016 tentang Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar yang menjadi landasan dalam pengembangan proses pembelajaran.

Kompetensi dasar pada mata pelajaran PPKn di kelas IX yang terkait dengan aspek pengetahuan terdapat 6 (enam) KD, yaitu KD 3.1 s.d. 3.6. Berdasarkan telaah terhadap KD tersebut, maka yang dinilai relevan dan dapat diintegrasikan nilai-nilai antikorupsi ke dalamnya adalah 4 (empat) KD, yaitu KD. 3.1, 3.3, 3.5, dan 3.6. Sedangkan 2 (dua) KD lainnya dinilai kurang relevan.

Kompetensi Inti:

Kompetensi Inti 1 (Sikap Spiritual)	Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya
Kompetensi Inti 2 (Sikap Sosial)	Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (toleran, gotong royong), santun, dan percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya
Kompetensi Inti 3 (Pengetahuan)	Memahami dan menerapkan pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata
Kompetensi Inti 4 (Keterampilan)	Mengolah, menyaji, dan menalar dalam ranah konkret (menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak (menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang/teori.

Telaah KI dan KD mata pelajaran PPKn terhadap nilai-nilai antikorupsi dilakukan melalui beberapa langkah sebagai berikut:

1. Menampilkan seluruh KD yang dikembangkan dari kompetensi inti ke dalam kolom sikap spiritual, sikap sosial, dan pengetahuan, dan keterampilan sesuai dengan Permendikbud Nomor 24 Tahun 2016.

Sikap Spiritual	Sikap Sosial	Pengetahuan	Keterampilan
1.1 Mensyukuri perwujudan Pancasila sebagai Dasar Negara yang merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa	2.1 Menunjukkan sikap bangga akan tanah air sebagai perwujudan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara	3.1 Membandingkan antara peristiwa dan dinamika yang terjadi di masyarakat dengan praktik ideal Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa	4.1 Merancang dan melakukan penelitian sederhana tentang peristiwa dan dinamika yang terjadi di masyarakat terkait penerapan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa
1.2 Menghargai isi alinea dan pokok pikiran yang terkandung dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai wujud rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa	2.2 Melaksanakan isi alinea dan pokok pikiran yang terkandung dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	3.2 Mensintesis isi alinea dan pokok pikiran yang terkandung dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945	4.2 Menyajikan hasil sintesis isi alinea dan pokok pikiran yang terkandung dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
1.3 Bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas bentuk dan kedaulatan Negara Republik Indonesia	2.3 Menunjukkan sikap bertanggung jawab dalam mendukung bentuk dan kedaulatan Negara	3.3 Memahami ketentuan tentang bentuk dan kedaulatan negara sesuai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945	4.3 Memaparkan penerapan tentang bentuk dan kedaulatan negara sesuai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
1.4 Menghormati keberagaman suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) di masyarakat sebagai pemberian Tuhan Yang Maha Esa	2.4 Mengutamakan sikap toleran dalam menghadapi masalah akibat keberagaman kehidupan masyarakat dan cara pemecahannya	3.4 Menganalisis prinsip persatuan dalam keberagaman suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), sosial, budaya, ekonomi, dan gender dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika	4.4 Mendemonstrasikan hasil analisis prinsip persatuan dalam keberagaman suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika
1.5 Mengapresiasi prinsip harmoni dalam keberagaman suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) sosial, budaya, ekonomi, dan gender dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa	2.5 Menunjukkan sikap peduli terhadap masalah-masalah yang muncul dalam bidang sosial, budaya, ekonomi, dan gender di masyarakat dan cara pemecahannya dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika	3.5 Menganalisis prinsip harmoni dalam keberagaman suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) sosial, budaya, ekonomi, dan gender dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika	4.5 Menyampaikan hasil analisis prinsip harmoni dalam keberagaman suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) sosial, budaya, ekonomi, dan gender dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika
1.6 Menunjukkan perilaku orang beriman dalam mencintai tanah air dalam	2.6 Mengutamakan sikap disiplin sebagai warga negara sejalan dengan konsep	3.6 Mengkreasikan konsep cinta tanah air/bela negara dalam	4.6 Mengorganisasikan kegiatan lingkungan yang mencerminkan

Sikap Spiritual		Sikap Sosial		Pengetahuan		Keterampilan
konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia		bela negara dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia		konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia		konsep cinta tanah air dalam konteks kehidupan sehari-hari

2. Mengidentifikasi Kompetensi Dasar (KD) yang dikembangkan dari Kompetensi Inti (KI) pengetahuan yang dinilai relevan dengan dimensi, indikator, dan nilai-nilai Antikorupsi, diikuti KD yang dikembangkan dari KI Keterampilan, kemudian KI sikap Spiritual, dan KI sikap sosial.

No	Pengetahuan	Keterampilan	Sikap Spiritual	Sikap Sosial
1	3.1 Membandingkan peristiwa dan dinamika yang terjadi di masyarakat dengan praktik ideal Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa	4.1 Merancang dan melakukan penelitian sederhana tentang peristiwa dan dinamika yang terjadi di masyarakat terkait penerapan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa	1.1 Mensyukuri perwujudan Pancasila sebagai Dasar Negara yang merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa	2.1 Menunjukkan sikap bangga akan tanah air sebagai perwujudan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara
2	3.2 Mensintesiskan isi alinea dan pokok pikiran yang terkandung dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945	4.2 Menyajikan hasil sintesis isi alinea dan pokok pikiran yang terkandung dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945	1.2 Menghargai isi alinea dan pokok pikiran yang terkandung dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai wujud rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa	2.2 Melaksanakan isi alinea dan pokok pikiran yang terkandung dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
3	3.3 Memahami ketentuan tentang bentuk dan kedaulatan negara sesuai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945	4.3 Memaparkan penerapan tentang bentuk dan kedaulatan negara sesuai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945	1.3 Bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas bentuk dan kedaulatan Negara Republik Indonesia	2.3 Menunjukkan sikap bertanggung jawab dalam mendukung bentuk dan kedaulatan Negara
4	3.4 Menganalisis prinsip persatuan dalam keberagaman suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), sosial, budaya, ekonomi, dan gender dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika	4.4 Mendemonstrasikan hasil analisis prinsip persatuan dalam keberagaman suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika	1.4 Menghormati keberagaman suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) di masyarakat sebagai pemberian Tuhan Yang Maha Esa	2.4 Mengutamakan sikap toleran dalam menghadapi masalah akibat keberagaman kehidupan bermasyarakat dan cara pemecahannya
5	3.5 Menganalisis prinsip harmoni dalam keberagaman suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) sosial, budaya,	4.5 Menyampaikan hasil analisis harmoni dalam keberagaman suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) sosial,	1.5 Mengapresiasi prinsip harmoni dalam keberagaman suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) sosial, budaya, ekonomi,	2.5 Menunjukkan sikap peduli terhadap masalah-masalah yang muncul dalam bidang sosial, budaya, ekonomi, dan gender di masyarakat dan cara

No	Pengetahuan	Keterampilan	Sikap Spiritual	Sikap Sosial
	ekonomi, dan gender dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika	budaya, ekonomi, dan gender dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika	dan gender dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa	pemecahannya dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika
6	3.6 Mengkreasikan konsep cinta tanah air/bela negara dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia	4.6 Mengorganisasikan kegiatan lingkungan yang mencerminkan konsep cinta tanah air dalam konteks kehidupan sehari-hari	1.6 Menunjukkan perilaku orang beriman dalam mencintai tanah air dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia	2.6 Mengutamakan sikap disiplin sebagai warga negara sejalan dengan konsep bela negara dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia

3. Berdasarkan telaah terhadap KD sebagaimana dituangkan dalam langkah 2, maka KD yang dapat diintegrasikan dimensi, indikator, dan nilai-nilai Antikorupsi adalah sebagai berikut:

No	Kompetensi Dasar	Indikator Pencapaian Kompetensi	Dimensi, Indikator, dan Nilai-Nilai Antikorupsi
1.	<p>1.1 Mensyukuri perwujudan Pancasila sebagai Dasar Negara yang merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa</p> <p>2.1 Menunjukkan sikap bangga akan tanah air sebagai perwujudan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara</p> <p>3.1 Membandingkan antara peristiwa dan dinamika yang terjadi di masyarakat dengan praktik ideal Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa</p> <p>4.1 Merancang dan melakukan penelitian sederhana tentang peristiwa dan dinamika yang terjadi di masyarakat terkait penerapan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa</p>	<p>1. Mensyukuri proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia yang diberkahi Allah Swt.</p> <p>2. Meyakini kebenaran Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa.</p> <p>3. Mendeskripsikan periodisasi berlakunya undang-undang dasar sebagai landasan yuridis konstitusi-nal Pancasila sebagai dasar negara.</p> <p>4. Mencocokkan peristiwa kenegaraan yang terjadi sesuai periodisasi berlakunya UUD dengan Pancasila sebagai dasar negara.</p> <p>5. Mendeskripsikan dinamika pelaksanaan nilai-nilai Pancasila sesuai periodisasi berlakunya UUD.</p> <p>6. Menuliskan contoh pelaksanaan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa (kebijakan didasarkan pada kepentingan umum/bersama, melaksanakan kebijakan secara jujur dan tanggung jawab).</p> <p>7. Menunjukkan contoh perilaku sesuai nilai-nilai Pancasila (jujur, tidak diskriminatif/ adil, melaksanakan musyawarah dalam menyelesaikan masalah/kebersamaan, hemat dalam menggunakan SDA, & menjunjung tinggi kebenaran).</p>	<p>1. Politik:</p> <p>a. Membuat kebijakan didasarkan pada kepentingan umum/bersama (adil).</p> <p>b. Melaksanakan kebijakan didasarkan sikap menjunjung tinggi kebenaran (jujur, berani).</p> <p>c. Melaksanakan pengawasan kebijakan secara tidak tebang pilih (adil, berani).</p> <p>d. Melaksanakan musyawarah dalam menyelesaikan masalah (kebersamaan).</p> <p>2. Sosiologi</p> <p>a. Menepati janji (tanggung jawab).</p> <p>b. Tidak diskriminatif dalam memberikan layanan (adil).</p> <p>c. Tidak nepotisme (adil, mandiri).</p> <p>d. Tidak kolusi (jujur, mandiri).</p> <p>e. Melaksanakan kerjasama tanpa melihat perbedaan agama, sosial, dan ekonomi (kesetaraan).</p> <p>f. Membunyikan radio, TV, tape dengan sewajarnya (bijaksana).</p> <p>g. Berpartisipasi menjaga keamanan lingkungan sosial (peduli).</p> <p>h. Melakukan donor darah (ikhlas).</p> <p>3. Ekonomi:</p> <p>a. Melakukan persaingan secara sehat (tanggung jawab,</p>

No	Kompetensi Dasar	Indikator Pencapaian Kompetensi	Dimensi, Indikator, dan Nilai-Nilai Antikorupsi
		<p>8. Mempresentasikan hasil telaah peristiwa dan pelaksanaan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa sesuai dinamika perkembangan jaman ber-dasarkan keberanian, mandiri dan bertanggung jawab.</p> <p>9. Menjelaskan arti pentingnya hidup mandiri, disiplin, kerja keras, hemat, dan bertanggung jawab dalam mewujudkan nilai-nilai Pancasila</p>	<p>jujur, kerja keras).</p> <p>b. Tidak menyuap (jujur, disiplin).</p> <p>c. Tidak boros dalam menggunakan sumber daya /energi, dan dana (sederhana, tanggung jawab).</p> <p>d. Tidak melakukan penyimpangan alokasi dan distribusi (jujur, peduli dan tanggung jawab).</p> <p>4. Hukum:</p> <p>a. Tidak melakukan penggelapan dana, pajak, barang, dan sebagainya (jujur, tanggung jawab).</p> <p>b. Tidak melakukan pemalsuan dokumen, surat, tanda tangan, dan sebagainya (jujur, tanggung jawab).</p> <p>c. Tidak melakukan pencurian dana, barang, waktu, ukuran yang merugikan pihak lain, dan sebagainya (jujur, tanggung jawab, disiplin).</p> <p>d. Tidak melakukan penipuan terhadap pihak lain (jujur, tanggung jawab).</p> <p>e. Tidak melakukan persekongkolan dalam membuat putusan (tanggung jawab).</p> <p>f. Tidak melakukan perusahaan barang /fasilitas milik negara (tanggung jawab, peduli).</p> <p>g. Tidak memberikan atau menerima gratifikasi (sederhana, jujur).</p> <p>h. Tidak menyalahi/melanggar aturan (disiplin, tanggung jawab).</p> <p>i. Melaksanakan keputusan dengan penuh tanggung jawab (komitmen).</p>
2.	<p>1.3 Bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas bentuk dan kedaulatan Negara Republik Indonesia</p> <p>2.3 Menunjukkan sikap bertanggung jawab dalam mendukung bentuk dan kedaulatan Negara</p> <p>3.3 Memahami ketentuan tentang bentuk dan kedaulatan negara sesuai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945</p> <p>4.3 Memaparkan penerapan tentang bentuk dan kedaulatan negara sesuai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945</p>	<p>1. Mensyukuri penetapan bentuk dan kedaulatan negara seperti yang tertuang dalam UUD NRI tahun 1945</p> <p>2. Menerima bentuk dan kedaulatan negara yang ditetapkan UUD NRI tahun 1945 dengan penuh tanggung jawab</p> <p>3. Menyebutkan bentuk-bentuk negara</p> <p>4. Mendeskripsikan bentuk negara sesuai UUD NRI tahun 1945</p> <p>5. Menjelaskan pengertian kedaulatan</p> <p>6. Mengidentifikasi sifat-sifat kedaulatan</p> <p>7. Menyebutkan sumber-sumber kedaulatan</p> <p>8. Mendeskripsikan kedaulatan negara sesuai UUD NRI tahun 1945</p> <p>9. Menjelaskan prinsip-prinsip pelaksanaan kedaulatan negara sesuai UUD NRI tahun 1945</p> <p>10. Menunjukkan contoh penerapan kedaulatan an negara sesuai UUD NRI tahun 1945 dengan jujur, adil, dan bijaksana</p> <p>11. Menyajikan hasil telaah penerapan bentuk dan kedaulatan negara sesuai UUD NRI tahun 1945</p>	<p>NILAI ACUAN ANTI KORUPSI</p> <p>KESETARAAN: kesejahteraan, sama tingkatan/kedudukan, sebanding sepadan, seimbang.</p> <p>KEBERSAMAAN: hal bersama, seperti rasa persaudaraan/kekeluargaan, senasib sepenanggungan, dan merasa menjadi satu kesatuan (integritas),</p> <p>KOMITMEN: Perjanjian, keterikatan untuk melakukan sesuatu (yang telah disepakati), kontrak.</p> <p>KONSEKUEN: Sesuai dengan apa yang dikatakan/diperbuat, berwatak teguh, tidak menyimpang dari apa yang sudah</p>
3.	<p>1.5 Mengapresiasi prinsip harmoni dalam keberagaman suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) sosial, budaya, ekonomi, dan gender dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa</p> <p>2.5 Menunjukkan sikap peduli terhadap</p>	<p>1. Mensyukuri adanya hubungan yang harmonis dalam masyarakat yang beragam</p> <p>2. Menerima keberagaman dengan tulus dalam masyarakat sebagai keniscayaan</p> <p>3. Menjelaskan pengertian harmoni</p> <p>4. Mendeskripsikan makna keberagaman</p> <p>5. Mendeskripsikan makna Bhinneka Tunggal Ika</p> <p>6. Mendeskripsikan prinsip harmoni dalam</p>	

No	Kompetensi Dasar	Indikator Pencapaian Kompetensi	Dimensi, Indikator, dan Nilai-Nilai Antikorupsi
	<p>masalah-masalah yang muncul dalam bidang sosial, budaya, ekonomi, dan gender di masyarakat dan cara pemecahannya dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika</p> <p>3.5 Menganalisis prinsip harmoni dalam keberagaman suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) sosial, budaya, ekonomi, dan gender dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika</p> <p>4.5 Menyampaikan hasil analisis prinsip harmoni dalam keberagaman suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) sosial, budaya, ekonomi, dan gender dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika</p>	<p>keberagaman</p> <p>7. Menjelaskan pentingnya prinsip harmoni dalam keberagaman suku, agama, ras, dan antargolongan, serta pada aspek sosial, budaya, ekonomi, dan gender.</p> <p>8. Menjelaskan manfaat hidup harmoni dalam keberagaman</p> <p>9. Menunjukkan contoh harmoni dalam pergaulan sesama teman yang berbeda suku, agama, ras, dan antargolongan</p> <p>10. Menampilkan sikap toleran terhadap keberagaman yang ada dalam masyarakat dengan penuh tanggung jawab dan bijaksana</p> <p>11. Menyajikan hasil analisis tentang baiknya prinsip harmoni dalam kehidupan masyarakat yang beragam dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika</p>	<p>diputuskan</p> <p>KEPEMILIKAN: perihal kepemilikan</p> <p>HEMAT: berhati-hati dalam membelanjakan uang, tidak boros, cermat.</p> <p>BIJAKSANA: selalu menggunakan akal budinya (pengalaman dan pengetahuannya), arif, tajam pikiran, pandai dan hati-hati (cermat, teliti, dsb.)</p> <p>IKHLAS: bersih hati, tulus hati.</p> <p>BERBAGI: membagi sesuatu bersama, membagi diri, saling memberi pengalaman.</p> <p>RAJIN: suka bekerja (belajar dsb.), tekun, sungguh-sungguh bekerja, selalu berusaha giat, terus menerus.</p> <p>SPORTIF: bersifat kesatria, jujur, tegak (tetap pendirian, tetap memegang keadilan).</p> <p>TANGGUNG JAWAB: keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dsb. Misalnya berani dan siap menerima resiko, amanah, tidak mengelak, dan berbuat yang terbaik), hak fungsi menerima pembebanan sebagai akibat sikap pihak sendiri atau pihak lain, melaksanakan dan menyelesaikan tugas dengan sungguh-sungguh.</p> <p>DISIPLIN: tata tertib, ketaatan (kepatuhan) pada peraturan, tepat waktu, tertib, dan konsisten.</p> <p>JUJUR: lurus hati, tidak curang, tulus, dapat dipercaya, berkata dan bertindak benar, mengungkapkan sesuatu sesuai dengan kenyataan (tidak berbohong), dan punya niat yang lurus terhadap setiap tindakan.</p> <p>SEDERHANA: bersahaja, sikap dan perilaku yang tidak berlebihan, tidak banyak seluk-beluknya, tidak banyak pemik, lugas, apa adanya, hemat, sesuai kebutuhan, dan rendah hati.</p> <p>KERJA KERAS: kegiatan melakukan sesuatu dengan sungguh-sungguh, pantang menyerah/ulet dan semangat dalam berusaha.</p> <p>MANDIRI: dalam keadaan dapat berdiri sendiri, tidak bergantung dengan orang lain, percaya pada</p>
4.	<p>1.6 Menunjukkan perilaku orang beriman dalam mencintai tanah air dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia</p> <p>2.6 Mengutamakan sikap disiplin sebagai warga negara sejalan dengan konsep bela negara dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia</p> <p>3.6 Mengkreasikan konsep cinta tanah air/bela negara dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia</p> <p>4.6 Mengorganisasikan kegiatan lingkungan yang mencerminkan konsep cinta tanah air dalam konteks kehidupan sehari-hari</p>	<p>1. Menyukuri bahwa negara Indonesia memiliki sejarah yang membanggakan yaitu kemerdekaan diraih sendiri dengan proklamasi, dan bukan pemberian dari negara lain.</p> <p>2. Menyatakan semangat dan komitmen persatuan dan kesatuan nasional dalam mengisi dan mempertahankan NKRI</p> <p>3. Mendeskripsikan konsep cinta tanah air</p> <p>4. Mendeskripsikan konsep bela negara</p> <p>5. Mengkaitkan konsep cinta tanah air dengan bela negara</p> <p>6. Menunjukkan contoh sikap cinta tanah air dalam bidang sains, olahraga, dan seni</p> <p>7. Menampilkan perilaku bela negara dalam kedudukannya sebagai peserta didik</p> <p>8. Menyajikan hasil telaah kegiatan lingkungan yang mencerminkan sikap cinta tanah air</p> <p>9. Mendeskripsikan sejarah perjuangan NKRI sebelum dan sesudah deklarasi Sumpah Pemuda tahun 1928 (komitmen, kebersamaan, tanggung</p>	

No	Kompetensi Dasar	Indikator Pencapaian Kompetensi	Dimensi, Indikator, dan Nilai-Nilai Antikorupsi
		<p>jawab)</p> <p>10. Mendeskripsikan perjuangan mempertahankan NKRI dengan berlandaskan semangat dan komitmen persatuan dan kesatuan nasional</p> <p>11. Mendeskripsikan potensi ancaman terhadap NKRI</p> <p>12. Menuliskan contoh bentuk partisipasi dan tanggungjawab kewarganegaraan yang mencerminkan komitmen terhadap keutuhan nasional</p> <p>13. Menjelaskan pentingnya hidup <u>mandiri, disiplin, kerja keras</u>, dan <u>bertanggung jawab</u> dalam menerapkan prinsip harmoni dalam kehidupan masyarakat yang beragam.</p>	<p>kemampuan diri sendiri, mampu mengatur dirinya sendiri, dan mengambil inisiatif.</p> <p>ADIL: sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak /tidak pilih kasih, berpihak/berpegang kepada kebenaran, sepatutnya, tidak sewenang-wenang, seimbang, netral, objektif dan proporsional.</p> <p>BERANI: mempunyai hati yang mantap dan rasa percaya diri yang besar dalam menghadapi bahaya, kesulitan, dsb. (Tidak takut, gentar, kecut) dan pantang mundur.</p> <p>PEDULI: mengindahkan, memperhatikan (empati), menghiraukan, menolong, toleran, setia kawan, membela, memahami, menghargai, dan memperlakukan orang lain sebaik-baiknya.</p>

BAB IV
MODEL PENGINTEGRASIAN NILAI-NILAI ANTIKORUPSI KE DALAM MATA PELAJARAN
PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN (PPKn)
KELAS IX

A. Pengintegrasian Nilai-nilai Antikorupsi dalam Kegiatan Intrakurikuler

1. Pengintegrasian Nilai-nilai Antikorupsi dalam Pengembangan Materi Pembelajaran

Kompetensi Inti

1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya.
2. Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli (toleransi, gotong royong), santun, dan percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya.
3. Memahami dan menerapkan pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata.
4. Mengolah, menyaji, dan menalar dalam ranah konkret (menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, membuat) dan ranah abstrak (menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang/teori.

No	Kompetensi Dasar	Indikator Pencapaian Kompetensi	Materi Pembelajaran	Dimensi, Indikator dan Nilai-Nilai Antikorupsi	Model Pengintegrasian Nilai-Nilai Antikorupsi
1.	1.1 Mensyukuri perwujudan Pancasila sebagai Dasar Negara yang merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa 2.1 Menun-	1. Mensyukuri proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia yang diberkahi Allah Swt. 2. Meyakini kebenaran Pancasila sebagai	1. Periodisasi berlakunya undang-undang dasar sebagai landasan yuridis konstitusional Pancasila sebagai dasar negara. 2. Pencocokkan peristiwa kenegaraan yang	Dimensi dan Indikator 1. Politik: a. Membuat kebijakan didasarkan pada kepentingan umum/bersama (adil, berani) b. Melaksanakan kebijakan	Kita sebagai bangsa patut dan layak bersyukur atas anugerah Allah Swt. Tuhan Yang Maha Kuasa, karena dalam proses kemerdekaan diri dari belenggu penjajah, pemimpin bangsa Indonesia mampu merumuskan nilai-nilai yang diyakini baik dan benar (yakni nilai-nilai Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan dan Keadilan) sebagai dasar negara . Apalagi nilai-nilai tersebut hidup dan terwujud dalam kehidupan nyata keseharian masyarakat dan bangsa, yang dalam terminologi politik disebut sebagai pandangan hidup (<i>way of life</i>) bangsa. Rasa syukur itu terasa lebih lagi karena tidak semua bangsa mampu melakukan sebagaimana yang bangsa Indonesia dapat raih. Oleh karena itu dapat dianggap hal yang wajar, kalau kita

No	Kompetensi Dasar	Indikator Pencapaian Kompetensi	Materi Pembelajaran	Dimensi, Indikator dan Nilai-Nilai Antikorupsi	Model Pengintegrasian Nilai-Nilai Antikorupsi
	<p>jukkan sikap bangsa akan tanah air sebagai perwujudan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara</p> <p>3.1 Memban- dingkan antara peristiwa dan dinamika yang terjadi di masyarakat dengan praktik ideal Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa</p> <p>4.1 Merancang dan melakukan penelitian sederhana tentang peristiwa dan</p>	<p>dasar negara dan pandangan hidup bangsa.</p> <p>3. Mendeskripsikan periodisasi berlakunya undang-undang dasar sebagai landasan yuridis konstitusional Pancasila sebagai dasar negara.</p> <p>4. Mencocokkan peristiwa kenegaraan yang terjadi sesuai periodisasi berlakunya UUD dgn Pancasila sebagai dasar negara.</p> <p>5. Mendeskripsikan dinamika pelaksanaan nilai-nilai Pancasila sesuai periodisasi berlakunya UUD.</p> <p>6. Menuliskan contoh pelaksanaan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa (kebijakan didasarkan pada</p>	<p>terjadi sesuai periodisasi berlakunya UUD dengan Pancasila sebagai dasar negara.</p> <p>3. Dinamika pelaksanaan nilai-nilai Pancasila sesuai periodisasi berlakunya UUD.</p> <p>4. Contoh pelaksanaan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa (kebijakan didasarkan pada kepentingan umum/bersama, melaksanakan secara jujur dan tanggung jawab.</p> <p>5. Contoh perilaku sesuai nilai-nilai Pancasila (jujur, tidak diskrimina tif/adil, melaksa nakan musya- warah dalam menyelesaikan masalah/keber- samaan, hemat dalam menggu-</p>	<p>didasari pada sikap menjunjung tinggi kebenaran (jujur, berani)</p> <p>c. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan secara tidak tebang pilih (adil, berani)</p> <p>d. Melaksanakan musyawarah dalam menyelesaikan masalah (kebersamaan)</p> <p>2. Sosiologi:</p> <p>a. Menepati janji (tanggung jawab)</p> <p>b. Tidak diskriminatif dalam memberikan layanan (adil)</p> <p>c. Tidak nepotisme (adil, mandiri)</p> <p>d. Tidak kolusi (jujur, mandiri)</p> <p>e. Melaksanakan kerjasama</p>	<p>sebagai bangsa, memiliki kebanggaan atas semuanya. Rasa syukur dan kebanggaan itu sudah seharusnya kalau kita wujudkan dalam bentuk sikap dan tindakan yang positif, misalnya: berupaya memahami nilai-nilai Pancasila, baik sebagai dasar negara maupun sebagai pandangan hidup bangsa, dan terutama berusaha mengamalkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari.</p> <p>Memahami nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara mengandung makna bahwa, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila (nilai-nilai Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan dan Keadilan) merupakan landasan dan dasar di mana Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) diselenggarakan dan dikelola. Artinya, nilai-nilai Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan dan Keadilan tersebut dijadikan landasan dan dasar dalam merumuskan kebijakan & peraturan perundang-undangan, dijadikan landasan dan dasar dalam pelaksanaan kebijakan & peraturan perundang-undangan (penyelenggaraan pemerintahan), juga dijadikan landasan dan dasar dalam pengawasan dan evaluasi. Dengan demikian penyelenggaraan dan pengelolaan negara harus sesuai dan selaras serta tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai tersebut.</p> <p>Hal ini sangat penting untuk dipahami dan dihayati oleh seluruh warga negara, terutama para penyelenggara negara. Adapun peserta didik, pentingnya memahami dan menghayati makna tersebut karena di tangan merekalah masa depan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara akan ditentukan. Oleh karena itu sejak dini mereka perlu dibekali dengan pemahaman dan penghayatan terhadap makna Pancasila, baik sebagai dasar negara maupun pandangan hidup bangsa sehingga sebagai calon pemimpin bangsa di masa datang, mereka dapat mewujudkan nilai-nilai Pancasila dalam kepemimpinannya.</p> <p>Selain itu, nilai-nilai Pancasila oleh bangsa Indonesia juga diyakini kebenaran dan kebaikannya sehingga dijadikan pandangan hidup (way of life), dalam arti nilai-nilai Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan dan Keadilan itu dijadikan landasan dan dasar bagi bangsa Indonesia dalam memandang dan menjalani kehidupan. Namun demikian kepada peserta didik juga perlu ditekankan bahwa, sebaik dan kebenaran setinggi apa pun suatu dasar negara, tanpa</p>

No	Kompetensi Dasar	Indikator Pencapaian Kompetensi	Materi Pembelajaran	Dimensi, Indikator dan Nilai-Nilai Antikorupsi	Model Pengintegrasian Nilai-Nilai Antikorupsi
	dinamika yang terjadi di masyarakat terkait penerapan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa	<p>kepentingan umum/ bersama, melaksanakan kebijakan secara jujur dan tanggung jawab.</p> <p>7. Menunjukkan contoh perilaku sesuai nilai-nilai Pancasila (jujur, tidak dis-kriminatif/adil, melaksana-kan musyawarah dalam menyelesaikan masalah/ kebersamaan, hemat dalam menggunakan SDA, & menjunjung tinggi kebenaran.</p> <p>8. Mempresentasikan hasil telaah peristiwa dan pelaksanaan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa sesuai dinamika perkembangan jaman ber-dasarkan keberani-an.</p>	<p>nakan SDA & menjunjung tinggi kebenaran.</p> <p>6. Arti pentingnya hidup mandiri, disiplin, kerja keras, dan bertanggung jawab dalam mewujudkan nilai-nilai Pancasila</p>	<p>tanpa melihat perbedaan agama, sosial, dan ekonomi (kesetaraan)</p> <p>f. Membunyikan radio, TV, tape dengan sewajarnya (biaksana)</p> <p>g. Berpartisipasi menjaga keamanan lingkungan (peduli)</p> <p>h. Melakukan aksi sosial (Ikhlas dan peduli).</p> <p>3. Ekonomi:</p> <p>a. Melakukan persaingan usaha secara sehat (tanggung jawab, jujur, kerja keras)</p> <p>b. Tidak menyuap (jujur)</p> <p>c. Tidak boros dalam menggunakan sumber daya (sederhana, tanggung jawab)</p> <p>d. Tidak</p>	<p>diimplementasikan atau diwujudkan dalam kenyataan hidup sehari-hari (berupa perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila), maka dasar negara itu hanya merupakan slogan yang tidak bermakna.</p> <p>Dalam perjalanan dan dinamika kehidupan bangsa Indonesia sejak kemerdekaan, telah mengalami pasang surut dan perkembangan yang tidak selalu menggembirakan. Saat-saat tertentu bahkan menghadapi permasalahan dan tantangan yang sangat berat dan mengarah pada konflik dan disintegrasi bangsa.</p> <p>Ketika UUD 1945 pertama kali berlaku (18 Agustus 1945-27 Desember 1949), di saat bangsa berjuang mempertahankan kemerdekaan dari upaya penjajahan kembali Belanda (yang didukung tentara Sekutu), terjadi pemberontakan PKI tahun 1948. Kemudian pada waktu berlaku UUD Sementara (17 Agustus 1950-5 Juli 1959) dengan demokrasi liberalnya, terjadi peristiwa DI-TII, pemberontakan Kahar Muzakar, Andi Aziz, PRRI-Permesta, Republik Maluku Selatan (RMS).</p> <p>Begitu kembali pada UUD 1945 melalui Dekrit Presiden 5 Juli 1959, berlangsung demokrasi terpimpin yang diikuti oleh doktrin Nasional, Agama, Komunis (NASAKOM), penghinaan PKI terjadi lagi pada 30 September 1965. Era ini dikenal dengan nama Orde Lama. Memasuki Orde Baru (11 Maret 1966), bangsa Indonesia bertekad melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen. Tapi dalam perjalanannya, penyimpangan pun terjadi. Penyimpangan itu sedemikian rupa sehingga menimbulkan ketidakpuasan yang meluas dalam masyarakat. Pada tahun 1998, mahasiswa sebagai <i>moral force</i> mempelopori demo besar-besaran yang berakibat pada tumbanganya Presiden Soeharto yang kemudian dinamakan Orde Reformasi.</p> <p>Sementara dinamika kehidupan yang berkembang pada masyarakat, tidak kalah hiruk pikuknya. Fenomena yang tampak menunjukkan bahwa nilai-nilai Pancasila semakin lama semakin pudar; apalagi yang terjadi di kota-kota besar. Pembunuhan, penculikan, pencurian, korupsi, penggunaan narkoba dan tindakan kejahatan lainnya seolah-olah menjadi peristiwa harian yang semakin memprihatinkan & mengawatirkan.</p> <p>Kalau dinamika kehidupan bangsa dan peristiwa yang terjadi pada</p>

No	Kompetensi Dasar	Indikator Pencapaian Kompetensi	Materi Pembelajaran	Dimensi, Indikator dan Nilai-Nilai Antikorupsi	Model Pengintegrasian Nilai-Nilai Antikorupsi
		<p><u>mandiri dan bertanggung jawab.</u></p> <p>9. Menjelaskan arti pentingnya hidup mandiri, disiplin, kerja keras, dan bertanggung jawab dalam mewujudkan nilai-nilai Pancasila</p>		<p>melakukan penyimpangan alokasi dan distribusi uang, barang dan jasa (jujur, peduli, tanggung jawab)</p> <p>4. Hukum:</p> <p>a. Tidak melakukan penggelapan dana, pajak, barang, dan sebagainya (jujur, tanggung jawab)</p> <p>b. Tidak melakukan pemalsuan dokumen, surat, tanda tangan, dan sebagainya (jujur, tanggung jawab)</p> <p>c. Tidak melakukan pencurian dana, barang, waktu, ukuran yang merugikan pihak lain, dan sebagainya (jujur, tanggung jawab, disiplin)</p> <p>d. Tidak</p>	<p>masyarakat sebagaimana secara singkat tersebut di atas kita cermati, maka ada benang merah yang dapat ditarik bahwa, peristiwa tersebut menggambarkan belum dipahami, dihayati dan diamlkannya nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Akibat yang terjadi adalah bangsa Indonesia belum dapat mewujudkan kehidupan seperti yang dicita-citakan, yaitu: masyarakat yang adil dan makmur.</p> <p>Berdasarkan pemahaman ini, ke depan bangsa Indonesia harus berusaha untuk hidup dan menjalankan segala aktivitasnya sesuai dan selaras dengan nilai-nilai Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan dan Keadilan.</p> <p>Agar sikap perilaku kita sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, maka sikap dan perilaku positif harus dikembangkan. Sikap perilaku tersebut antara lain: <u>jujur, sederhana, peduli, berbagi dan ikhlas</u> yang tercermin dalam perilaku sehari-hari sehingga tercipta suasana yang kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya karakter bangsa yang baik.</p> <p>Sebaliknya sikap dan perilaku negatif harus dihindari dan di jauhi dalam kehidupan sehari-hari, misalnya: <u>ambisi pribadi, perbuatan yang menguntungkan kelompok tertentu, memberi janji-janji/iming-iming agar pihak lain melanggar hukum, dan memberikan perlakuan tidak adil terhadap orang lain atau tebang pilih.</u></p> <p>Perwujudannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara adalah berusaha semaksimal mungkin bersikap dan bertindak yang sesuai dan sejalan dengan <u>ajaran agama, bermanfaat bagi sesama</u> dan mengedepankan atau mengutamakan <u>kepentingan umum/ bersama</u> di atas kepentingan pribadi dan golongan serta berupaya untuk <u>terwujudnya kesejahteraan bersama.</u></p> <p>Dalam interaksi sosial, sikap yang ditunjukkan <u>tidak diskriminatif</u> (membeda-bedakan dalam memperlakukan dan memberikan layanan terhadap orang lain), <u>tidak mementingkan keluarga atau kelompoknya (nepotisme)</u> dan <u>tidak melakukan persekongkolan (kospirasi)</u> dalam membuat keputusan yang merugikan banyak pihak (<u>kolusi</u>).</p> <p>Di samping itu, <u>berusaha mengembangkan sikap mandiri, disiplin,</u></p>

No	Kompetensi Dasar	Indikator Pencapaian Kompetensi	Materi Pembelajaran	Dimensi, Indikator dan Nilai-Nilai Antikorupsi	Model Pengintegrasian Nilai-Nilai Antikorupsi
2.	1.3 Bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas bentuk dan kedaulatan Negara Republik Indonesia 2.3 Menunjukkan sikap bertanggung jawab dalam mendukung bentuk dan kedaulatan Negara 3.3 Memahami ketentuan	1. Menyukuri penetapan bentuk dan kedaulatan negara seperti yang tertuang dalam UUD NRI tahun 1945 2. Menerima bentuk dan kedaulatan negara yang ditetapkan UUD NRI tahun 1945 dengan penuh tanggung jawab 3. Menyebutkan bentuk-bentuk negara 4. Mendeskripsikan bentuk negara sesuai UUD NRI	A. Bentuk-bentuk negara B. Bentuk negara sesuai UUD NRI tahun 1945 C. Pengertian kedaulatan D. Sifat-sifat kedaulatan E. Sumber-sumber kedaulatan F. Kedaulatan negara sesuai UUD NRI tahun 1945 G. Prinsip-prinsip pelaksanaan kedaulatan negara sesuai UUD NRI tahun	melakukan penipuan terhadap pihak lain (jujur) e. Tidak melakukan persekongkolan dalam membuat putusan (tanggung jawab) f. Tidak melakukan perusakan terhadap barang/fasilitas milik negara (tanggung jawab, peduli) g. Tidak memberikan atau menerima gratifikasi (jujur, sederhana) Nilai acuan antikorupsi KESETARAAN: kesetaraan, sama tingkatan/kedudukan, sebanding, sepadan, seimbang. KEBERSAMAAN: hal bersama, seperti rasa	<u>kerja keras, hemat dan bertanggung jawab dalam mengelola sumber daya dan aset-aset negara, dan sebaliknya harus dihindari sikap yang mengarah kepada pemborosan, persaingan tidak sehat, dan suap.</u> <u>Dalam rangka mewujudkan sikap yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, harus dihindari keinginan untuk melakukan penggelapan, pemalsuan dokumen, pemalsuan tanda tangan, plagiat, pencurian, penipuan, persekongkolan, perusakan, gratifikasi, menyontek dan menyalahi aturan.</u> Tindakan diskriminatif, nepotisme, konspirasi, kolusi, penggelapan, pemalsuan dokumen, pemalsuan tanda tangan, plagiat, pencurian, penipuan perusakan, gratifikasi & menyontek merupakan tindakan koruptif. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa tindakan koruptif adalah tindakan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Sikap dan perilaku negatif termasuk di dalamnya korupsi, dapat merugikan serta mengancam kepentingan masyarakat, bangsa dan negara. Dalam pembukaan UUD NRI Tahun 1945 alinea keempat ditegaskan bahwa: "Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia." Berdasarkan pemahaman terhadap makna pokok-pokok pikiran pembukaan Undang-undang Dasar NRI Tahun 1945 dan penegasan alinea di atas dapat dikemukakan bahwa dalam upaya mewujudkan tujuan negara, bangsa Indonesia berketetapan hati untuk memilih negara kesatuan dan kedaulatan rakyat sebagai bentuk negara dan

No	Kompetensi Dasar	Indikator Pencapaian Kompetensi	Materi Pembelajaran	Dimensi, Indikator dan Nilai-Nilai Antikorupsi	Model Pengintegrasian Nilai-Nilai Antikorupsi
	<p>tentang bentuk dan kedaulatan negara sesuai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945</p> <p>4.3 Memaparkan penerapan tentang bentuk dan kedaulatan negara sesuai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945</p>	<p>tahun 1945</p> <p>5. Menjelaskan pengertian kedaulatan negara</p> <p>6. Mengidentifikasi sifat-sifat kedaulatan</p> <p>7. Menyebutkan sumber-sumber kedaulatan</p> <p>8. Mendeskripsikan kedaulatan negara sesuai UUD NRI tahun 1945</p> <p>9. Menjelaskan prinsip-prinsip pelaksanaan kedaulatan negara sesuai UUD NRI tahun 1945</p> <p>10. Menunjukkan contoh penerapan kedaulatan negara sesuai UUD NRI tahun 1945 dengan jujur, adil, dan bijaksana</p> <p>11. Menyajikan hasil telaah penerapan bentuk kedaulatan negara sesuai UUD NRI tahun</p>	<p>1945</p> <p>H. Contoh penerapan kedaulatan negara sesuai UUD NRI tahun 1945 dengan jujur, adil, dan bijaksana</p> <p>I. Penerapan bentuk kedaulatan negara sesuai UUD NRI tahun 1945</p> <p>J. Pentingnya sikap <u>mandiri, disiplin, kerja keras, dan bertanggung jawab</u> dalam menerapkan bentuk kedaulatan negara sesuai UUD 1945.</p>	<p>persaudaraan/kekeluargaan, senasib sepenanggungan, dan merasa menjadi satu kesatuan (integritas), KOMITMEN: Perjanjian, keterikatan untuk melakukan sesuatu (yang telah disepakati), kontrak.</p> <p>KONSEKUEN: Sesuai dengan apa yang dikatakan/diperbuat, berwatak teguh, tidak menyimpang dari apa yang sudah diputuskan</p> <p>KEPEMILIKAN: perihal kepemilikan</p> <p>HEMAT: berhati-hati dalam membelanjakan uang, tidak boros, cermat.</p> <p>BIJAKSANA: selalu menggunakan akal budinya (pengalaman dan pengetahuannya),</p>	<p>bentuk pemerintahannya. Hal ini berarti bahwa negara Indonesia adalah negara kesatuan dan demokrasi.</p> <p>Demokrasi yang diterapkan di Indonesia adalah demokrasi perwakilan; artinya, aspirasi dan keterlibatan rakyat dalam ikut menentukan kehidupan dan perjalanan negara dilakukan melalui perwakilan mereka yang duduk di lembaga-lembaga: MPR, DPR-DPRD dan DPD.</p> <p>Pelaksanaan demokrasi dapat memberikan kemashlahatan kepada seluruh rakyat sangat bergantung dan memerlukan dukungan, paradigma, sikap dan tindakan yang positif dari seluruh elemen bangsa dan rakyat Indonesia. Dukungan tersebut tercermin pada <i>performance</i> (kinerja) 4 (empat) pilar demokrasi yakni: lembaga perwakilan, pemerintah, partai politik dan media massa.</p> <p>Pada lembaga perwakilan, perwujudannya dapat dilihat dalam proses menampung, mengolah, dan memperjuangkan aspirasi yang berkembang dalam masyarakat. Bila dalam menampung, mengolah, dan memperjuangkan aspirasi tersebut para anggota lembaga perwakilan lebih mengedepankan kepentingan dan kesejahteraan rakyat dan bukan berorientasi kepentingan kelompok apalagi kepentingan pribadi, maka demokrasi berpeluang dapat terlaksana dengan baik. Pada pemerintah, perwujudannya dapat dilihat dalam merumuskan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan. Bila kebijakan dan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah tersebut dapat membawa perbaikan bagi pelaksanaan demokrasi. Sementara pada partai politik, perwujudannya dapat dilihat pada pola kepemimpinan, rekrutmen dan ideologi yang dipegangnya. Apabila pola kepemimpinan dan rekrutmen yang dikembangkan oleh partai politik itu berprinsip pada <i>the right man on the right place</i>, dan ideologi yang menjadi landasan perjuangannya sejalan dengan kepentingan rakyat, maka pelaksanaan demokrasi kemungkinan besar dapat berjalan dengan baik. Sedangkan pada media massa perwujudannya dapat dilihat pada implementasi fungsi sosial kontrolnya. Bila media massa dalam menjalankan fungsi sosial kontrolnya konsisten dan demi kepentingan rakyat, maka dapat diharapkan pelaksanaan demokrasi tersebut berlangsung dengan</p>

No	Kompetensi Dasar	Indikator Pencapaian Kompetensi	Materi Pembelajaran	Dimensi, Indikator dan Nilai-Nilai Antikorupsi	Model Pengintegrasian Nilai-Nilai Antikorupsi	
		1945 12. <u>Menjelaskan pentingnya sikap mandiri, disiplin, kerja keras, dan bertanggung jawab</u> dalam menerapkan bentuk _____ dan kedaulatan negara _____ sesuai UUD 1945.		arif, tajam pikiran, pandai dan hati-hati (cermat, teliti, dsb.) IKHLAS:bersih hati, tulus hati. BERBAGI: membagi sesuatu bersama, membagi diri, saling memberi pengalaman. RAJIN: suka bekerja (belajar dsb.), tekun, sungguh2 bekerja, selalu berusaha giat, terus menerus. SPORTIF: bersifat kesatria, jujur, tegak (tetap pendirian, tetap memegang keadilan). TANGGUNG JAWAB: keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dsb. Misalnya berani dan siap menerima resiko, amanah. _____ tidak	baik. Sebaliknya bila keempat pilar demokrasi tersebut dalam melaksanakan fungsi, tugas dan kewenangannya asal-asalan dan setengah hati, apalagi tidak selaras dengan kepentingan rakyat, maka pelaksanaan demokrasi akan carut-marut dan menyengsarakan rakyat. Oleh karena itu semua pihak dituntut kejujuran dan keberanian untuk mengedepankan kepentingan umum (rakyat) yang didasarkan pada kebenaran dan keadilan serta menghindarkan diri dari ambisi pribadi, mengutamakan kelompok tertentu (diskriminatif), dan clientelistik (memberi janji-janji agar berpihak padanya). Dengan demikian dalam proses pengambilan keputusan, pelaksanaan dan pengawasannya harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab , dan bila terjadi penyimpangan maka perlu dilakukan tindakan terhadap pelakunya tanpa pandang bulu (tebang pilih). Terkait dengan hal di atas perlu menjadi perhatian semua pihak bahwa salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh calon pemimpin adalah tidak pernah dan tidak akan korupsi. Pada sisi lain, rakyat sebagai pihak yang memiliki hak untuk memilih pemimpin, harus konsisten untuk memilih yang tidak pernah dan tidak akan korupsi. Sesuai amanat UUD 1945, sistem pemerintahan Indonesia adalah demokrasi di mana kedaulatan negara ada di tangan rakyat. Artinya, rakyatlah yang menentukan bagaimana negara itu dijalankan, melalui wakil mereka baik yang duduk di lembaga perwakilan maupun pemerintahan. Di sini perlu dikembangkan sikap kesetaraan dan kebersamaan karena pada hakikatnya upaya mencapai tujuan sebagaimana tercantum dalam UUD 1945 adalah kewajiban bersama. Dalam pada itu para wakil rakyat harus memiliki komitmen, jujur dan konsekuen serta rasa tanggung jawab terhadap tugas mereka yaitu sungguh-sungguh memperhatikan dan memperjuangkan aspirasi dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat, misalnya: membuat kebijakan didasarkan pada kepentingan umum/bersama dan tidak melakukan KKN (korupsi, kolusi dan nepotisme). Pada sisi lain rakyat dituntut untuk disiplin dan bekerja keras serta memiliki keberanian untuk mengoreksi apabila terjadi penyimpangan disebabkan peduli	Model Pengintegrasian Nilai-Nilai Antikorupsi

No	Kompetensi Dasar	Indikator Pencapaian Kompetensi	Materi Pembelajaran	Dimensi, Indikator dan Nilai-Nilai Antikorupsi	Model Pengintegrasian Nilai-Nilai Antikorupsi
3.	1.5 Mengapresiasi prinsip harmoni dalam keberagaman suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) sosial, budaya, ekonomi, dan gender dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa 2.5 Menunjukkan sikap peduli terhadap masalah-masalah yang muncul	1. Mensyukuri adanya hubungan yang harmonis dalam masyarakat yg beragaman 2. Menerima keberagaman dengan tulus dalam masyarakat sebagai keniscayaan 3. Menjelaskan pengertian harmoni 4. Mendeskripsikan makna keberagaman 5. Mendeskripsikan makna Bhinneka Tunggal Ika 6. Mendeskripsikan prinsip harmoni dalam keberagaman 7. Menjelaskan pentingnya prinsip harmoni dalam keberagaman suku, agama, ras, dan antargolongan	1. Pengertian harmoni 2. Makna keberagaman 3. Makna Bhinneka Tunggal Ika 4. Prinsip harmoni dalam keberagaman 5. Pentingnya prinsip harmoni dalam keberagamansuk u, agama, ras, & antar golongan, serta pada aspek sosial, budaya, ekonomi & gender. 6. Manfaat hidup harmoni dlm keberagaman 7. Contoh harmoni dalam pergaulan sesama teman yang berbeda suku, agama, ras, dan antar golongan. 8. Contoh sikap	mengelak, dan membuat yang terbaik), hak fungsi menerima pembebanan sebagai akibat sikap pihak sendiri atau pihak lain, melaksanakan dan menyelesaikan tugas dengan sungguh-sungguh. DISIPLIN: tata tertib, ketaatan (kepatuhan) pada peraturan, tepat waktu, tertib, dan konsisten. JUJUR: lurus hati, tidak curang, tulus, dapat dipercaya, berkata benar, bertindak sesuai dengan kenyataan (tidak berbohong), dan punya niat yang lurus terhadap setiap tindakan. SEDERHANA:	pada nasib rakyat sehingga upaya mencapai cita-cita bersama akan berjalan efektif. Selain itu rakyat juga menghormati dan menjunjung tinggi lembaga negara dan pemerintah dengan cara ikut berpartisipasi secara aktif dalam melaksanakan hasil keputusan dan program-program pemerintah, khususnya terkait dengan pemberantasan korupsi. Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang beraneka ragam (beragam) karena terdiri atas berbagai suku bangsa, agama, adat istiadat, serta bahasa daerah yang berbeda-beda. Keberagaman yang terjadi di Indonesia dapat dikatakan sebagai potensi sekaligus tantangan. Dikatakan sebagai sebuah potensi, karena hal tersebut akan membuat bangsa kita menjadi bangsa yang besar dan memiliki kekayaan yang melimpah, baik kekayaan alam maupun kekayaan budaya yang dapat menarik minat wisatawan asing untuk mengunjungi Indonesia. Kebhinekaan bangsa Indonesia juga merupakan sebuah tantangan bahkan ancaman, karena dengan adanya kebhinekaan mudah membuat penduduk Indonesia berbeda pendapat dan lepas kendali, mudah tumbuhnya perasaan kedaerahan yang amat sempit yang sewaktu waktu dapat menjadi ledakan yang akan mengancam integrasi nasional atau persatuan dan kesatuan bangsa. Oleh karena itu, segenap warga negara mesti mewaspadai ancaman tersebut. Keberagaman ini merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Kuasa yang patut dihargai. Oleh karena itu, kita wajib selalu bersyukur atas anugerah ini, dengan selalu beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta menjaganya agar tetap harmoni dan lestari. Harmoni, secara etimologis (dalam bahasa Yunani: harmonia) berarti terikat secara serasi/sesuai. Sedangkan secara terminologis (makna), harmoni adalah kerja sama antara berbagai faktor sedemikian rupa sehingga faktor-faktor tersebut dapat menghasilkan suatu kesatuan yang luhur. Harmoni merupakan paduan keseluruhan, perpaduan antara keyakinan dan tingkah laku, menghormati, menyayangi apa yang ada, merangkul, mensinerjikan dan menyelaraskan segala macam perbedaan secara ikhlas dan aliamiah. Dengan harmoni akan tercipta sebuah energi yang merangkum tatanan kehidupan sosial yang indah dan teratur. Harmoni bukan keterpaksaan, tetapi ada

No	Kompetensi Dasar	Indikator Pencapaian Kompetensi	Materi Pembelajaran	Dimensi, Indikator dan Nilai-Nilai Antikorupsi	Model Pengintegrasian Nilai-Nilai Antikorupsi
	<p>dalam bidang sosial, budaya, ekonomi, dan gender di masyarakat dan cara pemecahannya dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika</p> <p>3.5 Menganalisis prinsip harmoni dalam keberagaman suku, ras, dan golongan</p> <p>10. Menampilkan sikap toleran terhadap keberagaman yang ada dalam masyarakat dengan penuh tanggung jawab dan bijaksana</p> <p>11. Menyajikan hasil analisis tentang baiknya prinsip harmoni dalam kehidupan masyarakat yang beragam dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika</p> <p>4.5 Menyampaikan hasil analisis</p>	<p>dan antar golongan, serta aspek social, budaya, ekonomi, dan gender.</p> <p>8. Menjelaskan manfaat hidup harmoni dalam keberagaman</p> <p>9. Menunjukkan contoh harmoni dalam pergaulan sesama teman yang berbeda suku, agama, ras, dan antar golongan</p> <p>10. Menampilkan sikap toleran terhadap keberagaman yang ada dalam masyarakat dengan penuh tanggung jawab dan bijaksana</p> <p>11. Menyajikan hasil analisis tentang baiknya prinsip harmoni dalam kehidupan masyarakat yang beragam dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika</p>	<p>toleran terhadap keberagaman yang ada dalam masyarakat dengan penuh tanggung jawab dan bijaksana</p> <p>9. Baiknya prinsip harmoni dalam kehidupan masyarakat yang beragam dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika</p> <p>10. Arti penting nilai-nilai mandiri, disiplin, kerja keras, dan bertanggung jawab dalam menerapkan prinsip harmoni dalam kehidupan masyarakat yg beragam.</p>	<p>bersahaja, sikap dan perilaku yang tidak berlebihan, tidak banyak seluk-beluknya, tidak banyak permik, lugas, apa adanya, hemat, sesuai kebutuhan, dan rendah hati.</p> <p>KERJA KERAS: kegiatan melakukan sesuatu dengan sungguh-sungguh, pantang menyerah/ulet dan semangat dalam berusaha.</p> <p>MANDIRI: keadaan dapat berdiri sendiri, tidak bergantung dengan orang lain, percaya pada kemampuan diri sendiri, mampu mengatur dirinya sendiri, dan mengambil inisiatif.</p> <p>ADIL: sama berat, tidak sebelah, tidak memihak /tidak pilih kasih,</p>	<p>sistem dan aturan yang menjadi kesepakatan bersama di mana semua komponen berusaha menjaganya karena menyangkut kepentingan bersama. Harmoni dimulai dari diri sendiri, keluarga, masyarakat, nasional, tatanan internasional, bahkan alam semesta. Dengan harmoni, semua akan menjadi indah, enak dibayangkan, dilihat, dirasakan, dan dinikmati.</p> <p>Prinsip harmoni berarti landasan/dasar yang menjadi acuan agar keberagaman mengarah kepada kerjasama sehingga menjadi kekuatan yang positif dan konstruktif.</p> <p>Semboyan 'Bhinneka Tunggal Ika' merupakan semboyan bangsa kita yang mengungkapkan persatuan dan kesatuan yang berasal dari keanekaragaman. Walaupun kita terdiri atas berbagai suku, agama, ras, antar golongan, dan budaya daerah, namun kita tetap satu bangsa, memiliki tanah air dan bahasa yang sama, yaitu tanah air dan bahasa Indonesia. Oleh karena itu sangat penting bagi kita untuk memiliki sikap sebagai berikut:</p> <p>1. Menghormati Suka Bangsa di Indonesia</p> <p>Kita sebagai bangsa Indonesia harus bersatu padu agar menjadi satu kesatuan yang bulat dan utuh. Untuk dapat bersatu kita harus memiliki pedoman yang dapat menyatukan pandangan kita dan tingkah laku kita dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, akan terjadi persamaan langkah dan tingkah laku bangsa Indonesia. Pedoman tersebut adalah Pancasila, kita harus dapat meningkatkan rasa persaudaraan dengan berbagai suku bangsa di Indonesia.</p> <p>Bangsa Indonesia harus merasa satu, senasib sepenanggungan, sebangsa, dan sehati dalam kekuatan nasional dengan segala isi dan kekayaannya sebagai satu kesatuan wilayah.</p> <p>Dalam mengembangkan sikap menghormati terhadap keragaman suku bangsa, dapat terlihat dari sifat dan sikap dalam kehidupan sehari-hari, diantaranya adalah sebagai berikut.</p> <ol style="list-style-type: none"> kehidupan bermasyarakat tercipta kerukunan seperti halnya dalam sebuah keluarga. antara warga masyarakat terdapat semangat tolong menolong, kerjasama untuk menyelesaikan suatu masalah, dan kerjasama dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

No	Kompetensi Dasar	Indikator Pencapaian Kompetensi	Materi Pembelajaran	Dimensi, Indikator dan Nilai-Nilai Antikorupsi	Model Pengintegrasian Nilai-Nilai Antikorupsi
	prinsip harmoni dalam keberagaman suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) sosial, budaya, ekonomi, dan gender dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika	12. Menjelaskan pentingnya hidup <u>mandiri, disiplin, kerja keras, dan bertanggung jawab</u> dalam menerapkan prinsip harmoni dalam kehidupan masyarakat yang beragam.		berpihak/berpegang kepada kebenaran, sepatutnya, tidak sewenang-wenang, seimbang, netral, objektif dan proporsional. BERANI: mempunyai hati yang mantap dan rasa percaya diri yang besar dalam menghadapi bahaya, kesulitan, dsb. (Tidak takut, gentar, kecut dan pantang mundur). PEDULI: mengindahkan, memperhatikan (empati), menghiraukan, menolong, setia kawan, membela, memahami, menghargai, dan memperlakukan orang lain sebaik-baiknya.	<p>c. dalam menyelesaikan urusan bersama selalu diusahakan dengan melalui musyawarah.</p> <p>d. terdapat kesadaran dan sikap yang mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan.</p> <p>2. Menghormati Agama yang ada di Indonesia Sejak kecil seseorang sudah diajarkan untuk meyakini dan melaksanakan ajaran agama. Dalam kehidupan berbangsa, kita mengetahui keberagaman dalam agama. Agama tersebut tidak mengajarkan untuk memaksakan kepercayaan kita kepada orang lain. Kita harus menghormati dan menghargai agama dan keyakinan orang lain. Dengan begitu tidak akan ada pertengkar.</p> <p>3. Menghormati Budaya di Indonesia Keanekaragaman budaya merupakan kekayaan bangsa kita. Kebudayaan-kebudayaan daerah merupakan modal utama untuk mengembangkan kebudayaan nasional. Kebudayaan nasional adalah puncak-puncak kebudayaan daerah yang ada di wilayah Indonesia. Kebudayaan daerah yang dapat menjadi kebudayaan nasional harus memenuhi syarat-syarat, seperti:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. menunjukkan ciri atau identitas bangsa 2. berkualitas tinggi sehingga dapat diterima oleh seluruh bangsa Indonesia; dan pantas dan tepat diangkat sebagai budaya nasional. <p>Kebudayaan dapat diartikan sebagai hasil cita, rasa, dan karya manusia dalam suatu masyarakat dan diteruskan dari generasi ke generasi melalui belajar. Jika kita telusuri, kebudayaan itu meliputi adat kebiasaan, upacara ritual, bahasa, kesenian, alat-alat, mata pencaharian, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Kebudayaan daerah adalah kebudayaan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat suatu daerah. Pada umumnya, kebudayaan daerah merupakan budaya asli dan telah lama ada serta diwariskan turun-temurun kepada generasi berikutnya.</p> <p>Sebagai warga negara Indonesia kita seharusnya bangga dengan adanya keanekaragaman kebudayaan. Bermacam-macam bentuk kebudayaan itu merupakan warisan yang tak ternilai harganya. Kita harus menghormati keanekaragaman budaya. Kita juga harus</p>

No	Kompetensi Dasar	Indikator Pencapaian Kompetensi	Materi Pembelajaran	Dimensi, Indikator dan Nilai-Nilai Antikorupsi	Model Pengintegrasian Nilai-Nilai Antikorupsi
					<p>melestarian dan mengembangkan berbagai bentuk warisan budaya yang ada sekarang ini</p> <p>Sikap menghormati keanekaragaman budaya dapat kita tunjukkan dengan sikap-sikap berikut ini.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menghormati kelompok lain yang menjalankan kebiasaan dan adat istiadatnya. 2. Tidak menghinia hasil kebudayaan suku bangsa lain. 3. Mau menonton seni pertunjukan tradisional. 4. Mau belajar dan mengembangkan berbagai jenis seni tradisional. 5. Bangga dengan hasil kebudayaan dalam negeri <p>4. Menghormati Ras yang ada di Indonesia</p> <p>Masyarakat Indonesia memiliki keberagaman ras, disebabkan oleh kedatangan bangsa asing ke wilayah dan menetap di Indonesia, Beberapa ras yang ada dalam masyarakat Indonesia antara lain ras Malayan-Mongoloid yang ada di Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan, dan Sulawesi. Kedua ras Melanesoid yang mendiami daerah Papua, Maluku, dan Nusa Tenggara Timur. Ketiga ras Asiatic Mongoloid seperti orang Tionghoa, Jepang, dan Korea. Ras ini tinggal menyebar di seluruh Indonesia, namun terkadang mendiami daerah tertentu. Terakhir adalah ras Kaukasoid yaitu orang India, Timur Tengah, Australia, Eropa, dan Amerika.</p> <p>Dalam rangka menghormati keragaman ras yang ada di tanah air, kita bisa mengembangkan sikap berikut ini.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menerima ras orang lain dalam pergaulan sehari-hari. Dalam pergaulan di masyarakat, kita tidak membedakan antara ras yang satu dengan yang lainnya 2. Tidak menjelek-jelekan, menghinia, dan merendahkan ras orang lain. Kita, manusia yang diciptakan Tuhan dengan harkat dan martabat yang sama. <p>5. Menghormati Golongan yang ada di Indonesia</p> <p>Sama halnya dengan sikap kita dalam menghormati keragaman ras, berikut beberapa sikap yang di kembangkan dalam menghormati kelompok atau golongan yang lain.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menerima golongan atau orang lain dalam pergaulan sehari-

No	Kompetensi Dasar	Indikator Pencapaian Kompetensi	Materi Pembelajaran	Dimensi, Indikator dan Nilai-Nilai Antikorupsi	Model Pengintegrasian Nilai-Nilai Antikorupsi
4.	1.6 Menunjukkan perilaku orang beriman dalam mencintai tanah air dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia 2.6 Mengutamakan sikap disiplin sebagai warga negara sejalan dengan konsep bela	1. Mensyukuri bahwa negara Indonesia memiliki sejarah yang membanggakan yaitu kemerdekaan diraih sendiri dengan proklamasi, dan bukan pemberian dari negara lain. 2. Menyatakan semangat dan komitmen persatuan dan kesatuan nasional dalam mengisi dan mempertahankan NKRI 3. Mendeskripsikan	1. Konsep tanah air 2. Konsep bela negara 3. Konsep cinta tanah air dengan bela negara 4. Contoh sikap cinta tanah air dalam bidang sains, olahraga, dan seni 5. Contoh perilaku bela negara dalam kedudukannya sebagai peserta didik 6. Contoh kegiatan lingkungan yang mencerminkan sikap cinta tanah air		<p>hari. Dalam pergaulan di masyarakat, kita tidak membedakan antara golongan yang satu dengan golongan dengan yang lainnya</p> <p>2. Tidak menjelek-jelekan, menghinakan, dan merendahkan golongan atau kelompok yang lain. Kita, manusia yang diciptakan Tuhan dengan harkat dan martabat yang sama.</p> <p>Persatuan dalam keragaman memiliki arti yang sangat penting. Persatuan dalam keragaman harus dipahami oleh setiap warga masyarakat agar dapat mewujudkan hal-hal sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kehidupan yang serasi, selaras dan seimbang 2. Pergaulan antarsesama yang lebih akrab 3. Perbedaan yang ada tidak menjadi sumber masalah 4. Pembangunan berjalan lancar <p>Cinta tanah air adalah perasaan yang timbul dari dalam hati sanubari seorang warga Negara, untuk mengabdikan, memelihara, membela, melindungi tanah airnya dari segala ancaman dan gangguan. Definisi lain mengatakan bahwa Rasa Cinta tanah air adalah rasa kebanggaan, rasa memiliki, rasa menghargai, rasa menghormati dan loyalitas yang dimiliki oleh setiap individu pada negara tempat ia tinggal yang tercermin dari perilaku membela tanah airnya, menjaga dan melindungi tanah airnya, rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negaranya, mencintai adat atau budaya yang ada dinegaranya dengan melestarikannya dan melestarikan alam dan lingkungan.</p> <p>Bangsa Indonesia memproklamkan kemerdekaan pada tanggal 17 Oktober 1945. Kemerdekaan itu diperoleh melalui perjuangan dan pengorbanan para pejuang yang tidak menilai harganya. Sejak itu, bangsa Indonesia bertekad untuk membela tanah airnya dari segala bentuk gangguan dan ancaman, baik yang datangnya dari dalam maupun dari luar. Kita tidak boleh lengah sedikit pun karena ancaman akan datang dari berbagai arah. Semangat persatuan dan kesatuan harus diperkukuh melalui berbagai kegiatan, baik yang bersifat lokal, kedaerahan, nasional, maupun internasional.</p> <p>Perilaku cinta tanah air dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, diantaranya memelihara persatuan dan kesatuan dan menyumbangkan pengetahuan dan keterampilan yang di miliki untuk</p>

No	Kompetensi Dasar	Indikator Pencapaian Kompetensi	Materi Pembelajaran	Dimensi, Indikator dan Nilai-Nilai Antikorupsi	Model Pengintegrasian Nilai-Nilai Antikorupsi
	<p>negara dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia</p> <p>3.6 Mengkre- asikan konsep cinta tanah air/bela negara dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia</p> <p>4.6 Mengor- ganisasikan kegiatan lingkungan yang mencermink an konsep cinta tanah air dalam konteks kehidupan sehari-hari</p>	<p>konsep cinta tanah air</p> <p>4. Mendeskripsikan konsep bela negara</p> <p>5. Mengkaitkan konsep cinta tanah air dengan bela negara</p> <p>6. Menunjukkan contoh sikap cinta tanah air dalam bidang sains, dan olahraga, dan seni</p> <p>7. Menampilkan perilaku bela negara dalam kedudukannya sebagai peserta didik</p> <p>8. Menyajikan hasil telaah kegiatan lingkungan yang mencerminkan sikap cinta tanah air</p> <p>9. Mendeskripsikan sejarah perjuangan NKRI sebelum dan sesudah deklarasi Sumpah Pemuda tahun 1928 (komitmen, kebersamaan,</p>	<p>7. <u>Sejarah perjuangan NKRI sebelum dan sesudah deklarasi Sumpah Pemuda tahun 1928</u> (komitmen, kebersamaan, tanggung jawab)</p> <p>8. Perjuangan mempertahankan NKRI dengan berlandaskan semangat dan komitmen persatuan dan kesatuan nasional</p> <p>9. Potensi ancaman terhadap NKRI</p> <p>10. Contoh bentuk partisipasi dan tanggungjawab kewarganegaraan yang mencerminkan komitmen terhadap keutuhan nasional.</p> <p>11. Pentingnya hidup mandiri, <u>disiplin, kerja keras, dan bertanggung jawab dalam menampikan perilaku cinta</u></p>		<p>membangun Negara.</p> <p>Untuk tetap terjaganya persatuan dan kesatuan, kita harus mampu menahan diri dan jangan mudah terhasut oleh ajakan yang belum tentu kebenarannya. Kita harus mampu mencegah perilaku yang mengarah pada perpecahan, adu domba, menfitnah, membuat keonaran, kejahatan, dan melanggar hukum.</p> <p>1. Mempelajari sejarah perjuangan para pahlawan pejuang kemerdekaan kita serta menghargai jasa para pahlawan kemerdekaan.</p> <p>2. Menghormati upacara bendera sebagai perwujudan rasa cinta tanah air dan bangsa Indonesia.</p> <p>3. Menghormati simbol-simbol Negara seperti lambang burung garuda, bendera merah putih, lagu kebangsaan Indonesia raya, dll.</p> <p>4. Mencintai dan menggunakan produk dalam negeri agar pengusaha lokal bisa maju sejajar dengan pengusaha asing.</p> <p>5. Ikut membela serta mempertahankan kedaulatan kemerdekaan bangsa dan Negara Indonesia dengan segenap tumpah darah secara tulus dan ikhlas.</p> <p>6. Turut serta mengawasi jalannya pemerintahan dan membantu meluruskan yang salah sesuai dengan mekanisme yang berlaku.</p> <p>7. Membantu mengharumkan nama bangsa dan Negara Indonesia kepada warga Negara asing baik di dalam maupun diluar negeri serta tidak melakukan tindakan-tindakan yang mencoreng nama baik Indonesia.</p> <p>8. Menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar pada acara-acara resmi dalam negeri.</p> <p>9. Beribadah dan berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa untuk kemajuan bangsa dan Negara.</p> <p>10. Membantu mewujudkan ketertiban dan ketemtraman baik di lingkungan sekitar kita maupun secara nasional.</p> <p>11. Mewakili negara dalam pertandingan olah raga, lomba budaya atau event lainnya.</p> <p>12. Mengembangkan karya inovatif, baik yang terkait dengan mode, artefak, seni, maupun karya desain.</p> <p>13. Berpartisipasi dalam komunitas yang menunjukkan kepeduliannya</p>

No	Kompetensi Dasar	Indikator Pencapaian Kompetensi	Materi Pembelajaran	Dimensi, Indikator dan Nilai-Nilai Antikorupsi	Model Pengintegrasian Nilai-Nilai Antikorupsi
		<p>tanggung jawab)</p> <p>10. Mendeskripsikan perjuangan mempertahankan NKRI dengan berlandaskan semangat dan komitmen persatuan dan kesatuan nasional</p> <p>11. Mendeskripsikan potensi ancaman terhadap NKRI</p> <p>12. Menuliskan contoh bentuk partisipasi dan tanggungjawab kewarganegaraan yang mencerminkan komitmen terhadap keutuhan nasional.</p> <p>13. Menjelaskan pentingnya hidup mandiri, disiplin, kerja keras, dan bertanggung jawab dalam menampilkan perilaku cinta tanah air/bela negara.</p>	<p>tanah air/bela negara.</p>		<p>pada masyarakat bawah.</p> <p>14. Ikut serta dalam mencegah dan memberantas terjadinya korupsi.</p>

B. Pengintegrasian Nilai-nilai Antikorupsi dalam Pengembangan Silabus

Kompetensi Inti:

1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya.
2. Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (tolerans, gotong royong), santun, dan percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya.
3. Memahami dan menerapkan pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata.
4. Mengolah, menyaji, dan menalar dalam ranah konkret (menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak (menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang/teori.

No	Kompetensi Dasar	Indikator Pencapaian Kompetensi	Materi Pokok	Pembelajaran	Penilaian	Alokasi Waktu	Sumber Belajar
1	<p>1.1 Bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas konsensus nasional Pancasila sebagai dasar dan pandangan hidup bangsa</p> <p>2. Mengembangkan sikap yang mencerminkan nilai-nilai luhur Pancasila sebagai dasar dan pandangan hidup bangsa</p> <p>3.1 Menelaah Pancasila sebagai dasar dan panda-</p>	<p>1 Menerima Pancasila sebagai dasar negara</p> <p>2 Menerima Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa</p> <p>3 Menjelaskan pentingnya nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa</p> <p>4 Mengidentifikasi nilai-nilai yang</p>	<p>1. Makna Pancasila sebagai dasar Negara</p> <p>2. Makna Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa</p> <p>3. Pentingnya memahami nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa.</p> <p>4. Nilai-nilai yang terkandung</p> <p>5.</p>	<p>Mengamati</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mengamati tayangan video suasana orang menggambar Garuda yang diiringi dengan lagu Garuda Pancasila. • Membaca artikel tentang Pancasila sebagai Dasar Negara dan Pandangan Hidup Bangsa • Menyimak dari berbagai sumber tentang perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa <p>Menanya</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mengajukan pertanyaan secara <i>High Order Thinking Skills</i> (HOTS) tentang arti pentingnya nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. • Mengidentifikasi pertanyaan tentang nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila 	<p>Sikap:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Observasi, penilaian diri, penilaian antar peserta didik, atau jurnal tentang kedudukan, fungsi, dan arti penting Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. <p>Pengetahuan:</p>	4 x 3 JP (12x40')	<ul style="list-style-type: none"> • UUD NRI 1945 • Kemdikbud, 2014, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan SMP/MTs Kelas VIII. • Tim Penyusun, 2015, Model Pengintegrasian Pendidikan

No	Kompetensi Dasar	Indikator Pencapaian Kompetensi	Materi Pokok	Pembelajaran	Penilaian	Alokasi Waktu	Sumber Belajar
	<p>ngan hidup bangsa</p> <p>4.1 Menyaji hasil telaah nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa dalam kehidupan sehari-hari</p>	<p>terkandung dalam Pancasila</p> <p>5 Mendeskripsikan makna nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa</p> <p>6 Menelaah contoh sikap yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa</p> <p>7 Menunjukkan contoh sikap dalam melaksanakan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa</p> <p>8 Menjelaskan pentingnya kesetaraan sebagai upaya mewujudkan nilai-nilai Pancasila</p>	<p>dalam Pancasila</p> <p>6. Makna nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa.</p> <p>7. Contoh sikap ikhlas dalam melaksanakan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa.</p> <p>8. Pentingnya kesetaraan sebagai upaya mewujudkan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa.</p> <p>9. Pentingnya kebersamaan sebagai upaya mewujudkan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa.</p>	<p>sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mengidentifikasi pertanyaan tentang contoh sikap ikhlas dalam melaksanakan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. • Mengumpulkan pertanyaan tentang pentingnya kesetaraan, kebersamaan, disiplin, hemat, dan tanggung jawab sebagai upaya mewujudkan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. <p>Mengumpulkan Informasi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mengumpulkan informasi yang diperoleh untuk menyimpulkan tentang arti pentingnya nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. • Mengumpulkan sumber data berkaitan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. • Mengumpulkan data tentang contoh sikap ikhlas dalam melaksanakan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. • Mengumpulkan informasi tentang pentingnya kesetaraan, kebersamaan, disiplin, hemat, dan tanggung jawab sebagai upaya mewujudkan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. <p>Menalar/ Mengasosiasi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menyimpulkan arti penting mempertahankan Pancasila sebagai dasar 	<ul style="list-style-type: none"> • Tes tertulis dengan bentuk uraian dan penugasan tentang kedudukan, fungsi, dan arti penting Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. <p>Keterampilan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Portofolio untuk menilai hasil telaah Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa 		<p>kan Antikorupsi pada Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) Berdasarkan Kurikulum 2013 SMP/MTs . Kelas VIII Jakarta: Kemdikbud</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tim Penyusun, <i>Pendidikan Kesadaran Berkonstitusi untuk SMP dan MTs</i>. Jakarta: Sekjen dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2009 • Referensi sesuai

No	Kompetensi Dasar	Indikator Pencapaian Kompetensi	Materi Pokok	Pembelajaran	Penilaian	Alokasi Waktu	Sumber Belajar
		<p>sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa.</p> <p>9 Menjelaskan pentingnya kebersamaan sebagai upaya mewujudkan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa.</p> <p>10 Menjelaskan pentingnya hidup disiplin sebagai upaya mewujudkan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa.</p> <p>11 Menjelaskan pentingnya hidup hemat sebagai upaya mewujudkan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa.</p>	<p>pandangan hidup bangsa.</p> <p>10. Pentingnya hidup disiplin sebagai upaya mewujudkan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa.</p> <p>11. Pentingnya hidup hemat sebagai upaya mewujudkan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa.</p> <p>12. Sikap yang mencerminkan tanggung jawab sebagai wujud nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa.</p>	<p>negara dan pandangan hidup bangsa, dan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mengumpulkan data tentang contoh sikap ikhlas dalam melaksanakan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. • Menentukan pentingnya kesetaraan, kebersamaan, disiplin, hemat, dan tanggung jawab sebagai upaya mewujudkan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. <p>Mengomunikasikan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menyampaikan hasil lisan dan tulisan tentang arti penting dan perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa • Mempresentasikan hasil diskusi kelompok sesuai tugas masing-masing kelompok. • Melaporkan kegiatan dan peran setiap peserta didik • Berpartisipasi dalam kegiatan sekolah atau masyarakat sebagai perwujudan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa, seperti membantu korban bencana alam, santunan yatim piatu, dan sebagainya. • Membuat dan membacakan ikrar/komitmen untuk mempertahankan dan melaksanakan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. • Mensimulasikan peran tokoh dalam 			<p>materi pokok</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lingkungan masyarakat dan sekolah

No	Kompetensi Dasar	Indikator Pencapaian Kompetensi	Materi Pokok	Pembelajaran	Penilaian	Alokasi Waktu	Sumber Belajar
		<p><u>pandangan hidup bangsa.</u></p> <p>12 <u>Menunjukkan sikap yang mencerminkan tanggung jawab sebagai wujud nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa.</u></p>		merumuskan Pancasila			
2	<p>1.2 Menghargai makna, kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai bentuk sikap dan beriman serta bertakwa</p> <p>2.2 Mendukung makna, kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, peraturan perundang-undangan lainnya sesuai Undang-Undang Dasar</p>	<p>1. Menyukuri adanya UUD Negara RI Tahun 1945 sebagai anugerah Allah Yang Maha Kuasa</p> <p>2. Menerima UUD Negara RI Tahun 1945 sebagai landasan sistem hukum nasional</p> <p>3. Menerima peraturan perundang-undangan sebagai bagian dari sistem hukum nasional</p> <p>4. Menjelaskan pentingnya sistem hukum</p>	<p>1. Arti dan makna UUD NRI tahun 1945.</p> <p>2. UUD NRI 1945 sebagai landasan sistem hukum nasional.</p> <p>3. Peraturan perundangan-undangan sebagai bagian dari sistem hukum</p> <p>4. Pentingnya sistem hukum nasional dalam kehidupan kenegaraan</p> <p>5. Makna UUD NRI Tahun 1945</p>	<p>Mengamati</p> <ul style="list-style-type: none"> • Membaca UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan teliti. • Mengamati dari video/film/gambar tentang Peraturan perundangan-undangan sebagai bagian dari sistem hukum nasional, dan pentingnya system hokum nasional dalam kehidupan kenegaraan. <p>Menanya</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mengidentifikasi pertanyaan tentang makna UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 • Mengajukan pertanyaan secara <i>High Order Thinking Skills</i> (HOTS) tentang kedudukan dan fungsi UUD NRI Tahun 1945, pentingnya ketaatan terhadap UUD NRI Tahun 1945 dan peraturan perundangan-undangan lainnya) dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta pentingnya sikap jujur, disiplin, adil, dan berani dalam melaksanakan peraturan perundangan yang berlaku. 	<p>Sikap:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Observasi, penilaian diri, penilaian antarpeserta didik, atau jurnal tentang kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta peraturan perundangan-undangan lainnya 	4 x 3 JP	<ul style="list-style-type: none"> • UUD NRI 1945 • Kemdikbud, 2014, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan -garaan SMP/MTs Kelas VIII. • Tim Penyusun, 2015, Model Pengintegrasian Pendidikan Antikorupsi pada Mata Pelajaran Pendidikan

No	Kompetensi Dasar	Indikator Pencapaian Kompetensi	Materi Pokok	Pembelajaran	Penilaian	Alokasi Waktu	Sumber Belajar
	<p>Negara Republik Indonesia 1945</p> <p>3.2 Menelaah makna, kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta peraturan perundangan-undangan lainnya dalam sistem hukum nasional</p> <p>4.2 Menyajikan hasil telaah makna, kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam penerapan kehidupan sehari-hari</p>	<p>nasional dalam kehidupan kenegaraan</p> <p>5. Mendeskripsikan makna UUD Negara RI Tahun 1945 sebagai landasan sistem hukum nasional</p> <p>6. Mendeskripsikan kedudukan dan fungsi UUD Negara RI Tahun 1945 dalam sistem hukum nasional</p> <p>7. Menjelaskan pentingnya ketepatan terhadap hukum (UUD Negara RI Tahun 1945 dan peraturan perundangan-undangan lainnya) dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara</p> <p>8. Menelaah hubungan hirarkhi antara Undang-Undang Dasar Negara</p>	<p>sebagai landasan sistem hukum nasional</p> <p>6. Kedudukan dan fungsi UUD Negara RI Tahun 1945 dalam sistem hukum nasional</p> <p>7. Pentingnya ketepatan terhadap hukum (UUD Negara RI Tahun 1945 dan peraturan perundangan-undangan lainnya) dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara</p> <p>9. Hubungan hirarkhi antara UUD NRI Tahun 1945 dengan peraturan perundangan-undangan lainnya) dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta hubungan hirarkhi antara UUD NRI Tahun 1945 dengan peraturan perundangan-undangan lainnya dalam sistem hukum nasional.</p> <p>10. Contoh perilaku</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Menelaah pertanyaan hubungan hirarkhi antara UUD NRI Tahun 1945 dengan peraturan perundangan-undangan lainnya dalam sistem hukum nasional • Mengidentifikasi pertanyaan tentang contoh perilaku taat terhadap hukum (mematuhi rambu-rambu lalu lintas, membayar pajak, tidak korupsi) dan contoh perilaku melanggar hukum (tindakan korupsi) <p>Mengumpulkan Informasi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menghubungkan informasi yang diperoleh untuk menyimpulkan tentang makna, kedudukan dan fungsi UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta peraturan perundangan-undangan lainnya dalam sistem hukum nasional. • Mengumpulkan sumber data berkaitan dengan makna UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kedudukan dan fungsi UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pentingnnya ketaatan terhadap UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan peraturan perundangan-undangan lainnya) dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara • Mengumpulkan data tentang contoh perilaku taat terhadap hukum (mematuhi rambu-rambu lalu lintas, membayar pajak, tidak korupsi), dan contoh perilaku melanggar hukum (tindakan korupsi) • Mengumpulkan informasi tentang 	<p>dalam sistem hukum nasional</p> <p>Pengetahuan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tes tertulis dengan bentuk uraian dan penugasan tentang kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta peraturan perundangan-undangan lainnya dalam sistem hukum nasional <p>Keterampilan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Portofolio untuk menilai hasil telaah tentang kedudukan dan fungsi Undang-Undang 		<p>Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) Berdasarkan Kurikulum 2013 SMP//M.Ts . Kelas VIII Jakarta: Kemdikbud</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tim Penyusun, Pendidikan Kesadaran Berkonstitusi untuk SMP dan MTs.Jakarta: Sekjen dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2009 • Referensi sesuai materi pokok • Lingkungan masyarakat

No	Kompetensi Dasar	Indikator Pencapaian Kompetensi	Materi Pokok	Pembelajaran	Penilaian	Alokasi Waktu	Sumber Belajar
		Republik Indonesia Tahun 1945 dengan peraturan perundangan-undangan lainnya dalam sistem hukum nasional 9. Menunjukkan contoh perilaku taat terhadap hukum (mematuhi rambu-rambu lalu lintas, membayar pajak, tidak korupsi) 10. Menunjukkan contoh perilaku melanggar hukum (tindakan koruptif) 11. Menjelaskan pentingnya sikap jujur dalam melaksanakan peraturan perundangan yang berlaku 12. Menjelaskan pentingnya sikap disiplin dalam melaksanakan peraturan	taat terhadap hukum (mematuhi rambu-rambu lalu lintas, membayar pajak, tidak korupsi) 11. Contoh perilaku melanggar hukum (tindakan koruptif) 12. Pentingnya sikap jujur dalam melaksanakan peraturan perundangan yang berlaku. 13. Pentingnya sikap disiplin dalam melaksanakan peraturan perundangan yang berlaku 14. Pentingnya sikap adil dalam melaksanakan peraturan perundangan yang berlaku 15. Pentingnya sikap berani	<p>pentingnya sikap jujur, disiplin, adil, dan berani dalam melaksanakan peraturan perundangan yang berlaku.</p> <p>Menalar/ Mengasosiasi</p> <ul style="list-style-type: none"> Menyimpulkan makna UUD NRI Tahun 1945, kedudukan dan fungsi UUD NRI Tahun 1945, arti pentingnya ketaatan terhadap UUD NRI Tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan lainnya) dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, hubungan hirarki antara UUD NRI Tahun 1945 dengan peraturan perundang-undangan lainnya dalam sistem hukum nasional. Menentukan contoh perilaku taat terhadap hukum (mematuhi rambu-rambu lalu lintas, membayar pajak, tidak korupsi), dan contoh perilaku melanggar hukum (tindakan koruptif) Menentukan pentingnya sikap jujur, disiplin, adil, dan berani dalam melaksanakan peraturan perundangan yang berlaku. <p>Mengomunikasikan</p> <ul style="list-style-type: none"> Menyusun laporan dan menyajikan hasil telaah tentang makna, fungsi, dan kedudukan UUD NRI Tahun 1945 dalam sistem hukum nasional juga peraturan – peraturan lainnya dengan percaya diri dan tanggung jawab. Mensimulasikan peran tokoh dalam dalam merumuskan UUD NRI Tahun 1945. 	Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta peraturan perundang-undangan lainnya dalam sistem hukum nasional.		kat dan sekolah

No	Kompetensi Dasar	Indikator Pencapaian Kompetensi	Materi Pokok	Pembelajaran	Penilaian	Alokasi Waktu	Sumber Belajar
3	1.3 Bersyukur kepada Tuhan yang Maha Esa untuk nilai dan semangat Kebangkitan nasional 1908 dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia 2.3 Menunjukkan sikap disiplin dalam menerapkan aturan sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam tata aturan peraturan perundang-undangan nasional 3.3 Memahami tata	perundangan yang berlaku 13. Menjelaskan pentingnya sikap adil dalam melaksanakan peraturan perundangan yang berlaku 14. Menjelaskan pentingnya sikap berani dalam melaksanakan peraturan perundangan yang berlaku	<u>dalam melaksanakan peraturan perundangan yang berlaku.</u> 1 Arti dan makna hukum 2 Peraturan perundangan Indonesia yang berlaku sebagai wujud ketaatan kepada Tuhan Yang Maha Esa 3 Pentingnya mentaati peraturan perundangan di Indonesia 4 Contoh perilaku taat terhadap peraturan perundangan	Mengamati • Mengamati gambar tentang upacara bendera dan urutan peraturan perundangan sesuai dengan Undang-Undang No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, • Membaca beragam peraturan perundang-undangan dan implementasinya sebagai wujud peduli dan syukur terhadap Tuhan Yang Maha Esa. • Mengamati perilaku teman berkaitan dengan pelaksanaan kewajiban di lingkungan sekolah • Mengamati dari video/film/gambar tentang perilaku ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan di lingkungan masyarakat Menanya • Mengajukan pertanyaan dengan	Sikap: • Observasi, penilaian diri, penilaian antar peserta didik, atau jurnal tentang makna tata urutan peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional di Indonesia. Pengetahuan: • Tes tertulis	2 x 3 JP	<ul style="list-style-type: none"> • UUD NRI 1945 • Undang-Undang No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan • Kemdikbud, 2014, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

No	Kompetensi Dasar	Indikator Pencapaian Kompetensi	Materi Pokok	Pembelajaran	Penilaian	Alokasi Waktu	Sumber Belajar
	urutan peraturan perundang-undangan dalam sistem nasional Indonesia 4.3 Mendemonstrasikan pola pengembangan tata urutan peraturan perundang-undangan dalam sistem nasional Indonesia	4 Menunjukkan contoh sikap perilaku terhadap peraturan perundang-undangan. 5 Mendeskripsikan tata urutan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia 6 Menjelaskan tujuan dibentuknya peraturan perundang-undangan nasional 7 Mendeskripsikan tahap-tahap proses pembuatan peraturan perundang-undangan nasional 8 Mengidentifikasi kasus pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan	undangan. 5 Tata urutan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia 6 Tujuan dibentuknya peraturan perundang-undangan nasional 7 Tahap-tahap proses pembuatan peraturan perundang-undangan nasional 8 Kasus pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang mengarah pada tindakan koruptif di Indonesia. 9 Pentingnya hidup disiplin, adil, dan bertanggung jawab dalam mematuhi	menggunakan <i>High Order Thinking Skills</i> (HOTS) tentang arti dan makna hukum, peraturan perundang-undangan Indonesia yang berlaku, arti pentingnya mentaati peraturan perundang-undangan di Indonesia, tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia sesuai dengan UU No. 12 tahun 2011, tujuan dibentuknya peraturan perundang-undangan nasional, dan tahap-tahap proses pembuatan peraturan perundang-undangan nasional. • Mengidentifikasi pertanyaan tentang contoh perilaku taat terhadap peraturan perundang-undangan. • Mengajukan pertanyaan tentang kasus pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang mengarah pada tindakan koruptif di Indonesia dan pentingnya hidup disiplin, adil, dan bertanggung jawab dalam mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mengumpulkan Informasi • Mencari informasi dari berbagai sumber tentang arti dan makna hukum, peraturan perundang-undangan Indonesia yang berlaku, arti pentingnya mentaati peraturan perundang-undangan di Indonesia, tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia sesuai dengan UU No. 12 tahun 2011, tujuan dibentuknya peraturan perundang-undangan nasional, tahap-tahap proses pembuatan peraturan perundang-undangan nasional. contoh perilaku taat terhadap peraturan perundang-undangan.	dengan bentuk uraian dan penugasan tentang makna tata urutan peraturan peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional di Indonesia. . Keterampilan: • Portofolio untuk menilai hasil telaah makna tata urutan peraturan perundang-undangan.		SMP/MTs Kelas VIII. • Tim Penyusun, 2015, Model Pengintegrasian Pendidikan Antikorupsi pada Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) Berdasarkan Kurikulum 2013 SMP//M.Ts . Kelas VIII Jakarta: Kemdikbud • Tim Penyusun, Pendidikan Kesadaran Berkonstitusi untuk SMP dan

No	Kompetensi Dasar	Indikator Pencapaian Kompetensi	Materi Pokok	Pembelajaran	Penilaian	Alokasi Waktu	Sumber Belajar
		<p>yang mengarah pada tindakan koruptif di Indonesia.</p> <p>9 Menjelaskan pentingnya hidup disiplin, adil, dan bertanggung jawab dalam mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p>	<p>peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Mengumpulkan data tentang kasus pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang mengarah pada tindakan koruptif di Indonesia, pentingnya hidup disiplin, adil, dan bertanggung jawab dalam mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. <p>Menalar/Mengasosiasi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menghubungkan informasi yang diperoleh untuk menyimpulkan tentang makna tata urutan peraturan perundang-undangan. • Mengambil kesimpulan berdasarkan informasi tentang materi yang dipelajari. • Menentukan contoh perilaku taat terhadap peraturan perundang-undangan, contoh kasus pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang mengarah pada tindakan koruptif di Indonesia, pentingnya hidup disiplin, adil, dan bertanggung jawab dalam mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. <p>Mengomunikasikan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menyusun laporan hasil telaah tentang makna tata urutan peraturan perundang-undangan secara tertulis. • Menyajikan hasil telaah di kelas. • Memajang hasil telaah (disiplai) di dinding kelas dengan bangga dan penuh rasa tanggung jawab. • Mensimulasikan peran tokoh dalam menyusun tata urutan perundang-undangan. 			<p>MTs Jaka-rta: Sekjen dan Kepani-teraan Mahkamah Konstitusi RI, 2009</p> <ul style="list-style-type: none"> • Referensi sesuai materi pokok • Lingkungan masyarakat dan sekolah
4	1.6 Menyukuri semangat dan	1 Menyukuri adanya para	1 Semangat & komitmen	<p>Mengamati</p> <ul style="list-style-type: none"> • Membaca wacana dan gambar tentang 	Sikap	3 x 3 JP	<ul style="list-style-type: none"> • UUD NRI 1945

No	Kompetensi Dasar	Indikator Pencapaian Kompetensi	Materi Pokok	Pembelajaran	Penilaian	Alokasi Waktu	Sumber Belajar
	<p>komitmen kolektif kebangsaan untuk memperkuat NKRI yang berketuhanan Yang Maha Esa</p> <p>2.6 Menunjukkan sikap gotong royong sebagai wujud nyata semangat dan komitmen kolektif kebangsaan untuk memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia</p> <p>3.6 Menginterpretasikan semangat dan komitmen kebangsaan kolektif untuk memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam konteks kehidupan siswa</p> <p>4.6 Mengorganisasikan kegiatan lingkungan yang mencerminkan semangat dan komitmen kebangsaan untuk memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia</p>	<p>pendiri negara yang memiliki semangat & komitmen kebangsaan yang tinggi</p> <p>2 Menjelaskan arti dan makna semangat dan komitmen kebangsaan dalam merebut kemerdekaan</p> <p>3 Menjelaskan arti dan makna semangat dan komitmen kebangsaan dalam mengisi kemerdekaan</p> <p>4 Menerima sikap semangat & komitmen kebangsaan sebagai nilai yang dijunjung tinggi</p> <p>5 Menyadari pentingnya menjaga semangat komitmen dalam memperkuat NKRI</p> <p>6 Menunjukkan</p>	<p>kebangsaan Indonesia yang tinggi yang dimiliki para pendiri Negara</p> <p>2 Arti dan makna semangat & komitmen kebangsaan dalam merebut kemerdekaan</p> <p>3 Arti dan makna semangat & komitmen kebangsaan dalam mengisi kemerdekaan</p> <p>4 Sikap semangat & komitmen kebangsaan sebagai nilai yang dijunjung tinggi</p> <p>5 Pentingnya menjaga semangat & komitmen dalam memperkuat NKRI</p> <p>6 Contoh sikap semangat & komitmen kebangsaan</p>	<p>kerukunan masyarakat , dan berita tentang proses terjadinya Proklamasi Kemerdekaan Indonesia sebagai wujud komitmen kebangsaan para pendiri negara.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mengamati gambar berbagai adat kebiasaan sesuai suku bangsa di Indonesia • Mengamati gambar / tayangan video sidang MPR atau DPR dalam membuat keputusan/ komitmen dengan penuh bangga dan syukur terhadap Tuhan Yang Maha Esa <p>Menanya</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mengajukan pertanyaan dengan menggunakan <i>High Order Thinking Skills</i> (HOTS) tentang arti dan makna semangat & komitmen kebangsaan dalam merebut kemerdekaan dan mengisi kemerdekaan, pentingnya menjaga semangat & komitmen dalam memperkuat NKRI, serta semangat dan komitmen kebangsaan kolektif untuk memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam konteks kehidupan siswa sesuai peraturan yang berlaku. • Mengidentifikasi pertanyaan tentang sikap semangat & komitmen kebangsaan sebagai nilai yang dijunjung tinggi. • Mengidentifikasi pertanyaan tentang contoh sikap semangat & komitmen kebangsaan sebagai peserta didik, sebagai warga masyarakat, dan sebagai warga negara. • Mengidentifikasi pertanyaan tentang sikap komitmen kebangsaan kolektif yang termasuk dalam pengembangan nilai-nilai 	<p>penilaian diri, penilaian antar peserta didik, atau jurnal tentang semangat dan komitmen kebangsaan kolektif untuk memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam konteks kehidupan siswa</p> <p>Pengetahuan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tes tertulis (uraian) dan penugasan tentang semangat dan komitmen kebangsaan kolektif untuk memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam konteks 		<ul style="list-style-type: none"> • Kemdikbud , 2014, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan SMP/MTs Kelas VIII. • Tim Penyusun, 2015, Model Pengintegrasian Pendidikan Antikorupsi pada Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) Berdasarkan Kurikulum 2013 SMP/MTs . Kelas VIII Jakarta: Kemdikbud • Tim

No	Kompetensi Dasar	Indikator Pencapaian Kompetensi	Materi Pokok	Pembelajaran	Penilaian	Alokasi Waktu	Sumber Belajar
		<p>contoh sikap semangat & komitmen kebangsaan sebagai peserta didik</p> <p>7 Menunjukkan contoh sikap semangat & komitmen kebangsaan sebagai warga masyarakat</p> <p>8 Menunjukkan contoh sikap semangat & komitmen kebangsaan sebagai warga masyarakat</p> <p>9 Menafsirkan/memaknai semangat dan komitmen kebangsaan kolektif untuk memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam konteks kehidupan sebagai warga negara</p> <p>10 Mengidentifikasi</p>	<p>sebagai peserta didik, sebagai warga masyarakat, dan _____ warga negara.</p> <p>7. Semangat dan komitmen kebangsaan kolektif untuk memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam konteks kehidupan siswa sesuai peraturan yang berlaku</p> <p>8. Sikap komitmen kebangsaan kolektif _____ yang termasuk dalam pengembangan nilai-nilai antikorupsi</p> <p>9. Makna korupsi</p> <p>10. Faktor penyebab terjadinya korupsi.</p> <p>11. Solusi pencegahan dan</p>	<p><u>antikorupsi</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Mengajukan pertanyaan tentang <u>makna korupsi</u>, <u>faktor penyebab terjadinya korupsi</u>, <u>solusi pencegahan dan pemberantasan korupsi</u>, dan <u>pentingnya hidup mandiri berdasarkan kesetaraan, kebersamaan, dan bertanggung jawab dalam memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)</u> <p>Mengumpulkan Informasi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mencari informasi untuk menjawab pertanyaan tentang norma dan kebiasaan antar daerah di Indonesia. • Melakukan pengamatan dan wawancara berbagi norma dalam masyarakat • Mencari informasi untuk menjawab pertanyaan tentang arti dan makna semangat & komitmen kebangsaan dalam merebut kemerdekaan dan mengisi kemerdekaan, pentingnya menjaga semangat & komitmen dalam memperkuat NKRI, serta semangat dan komitmen kebangsaan kolektif untuk memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam konteks kehidupan siswa sesuai peraturan yang berlaku, pentingnya sikap semangat & komitmen kebangsaan sebagai nilai yang dijunjung tinggi, serta makna korupsi, faktor penyebab terjadinya korupsi, solusi pencegahan dan pemberantasan korupsi, dan pentingnya hidup mandiri berdasarkan kesetaraan, kebersamaan, dan bertanggung jawab dalam memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). 	<p>kehidupan siswa</p> <p>Keterampilan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Portofolio tentang telaah semangat dan komitmen kebangsaan kolektif untuk memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam konteks kehidupan siswa. 		<p>Penyusun, <i>Pendidikan Kesadaran Berkonstitusi untuk SMP dan MTs</i>. Jakarta: Sekjen dan Kepani-teraan Mahkamah Konstitusi RI, 2009</p> <ul style="list-style-type: none"> • Referensi sesuai materi pokok • Lingkung-an masyarakat dan sekolah

No	Kompetensi Dasar	Indikator Pencapaian Kompetensi	Materi Pokok	Pembelajaran	Penilaian	Alokasi Waktu	Sumber Belajar
		sikap komitmen kebangsaan kolektif yang termasuk dalam pengembangan nilai-nilai antikorupsi 11 Menafsirkan makna korupsi 12 Mengidentifikasi factor penyebab terjadinya korupsi. 13 Menafsirkan solusi pencegahan dan pemberantasan korupsi 14 Menjelaskan pentingnya hidup mandiri, berdasarkan kesetaraan, kebersamaan, dan bertanggung jawab dalam memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)	pemberantasan korupsi 12. Pentingnya hidup mandiri, berdasarkan kesetaraan, kebersamaan, dan bertanggung jawab dalam memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).	<ul style="list-style-type: none"> • Mengumpulkan data tentang contoh sikap semangat & komitmen kebangsaan sebagai peserta didik, sebagai warga masyarakat, dan sebagai warga negara. • Mengumpulkan data tentang sikap komitmen kebangsaan kolektif yang termasuk dalam pengembangan nilai-nilai antikorupsi Menalar/Mengasosiasi <ul style="list-style-type: none"> • Dengan penuh disiplin dan kerjasama kelompok menghubungkan berbagai informasi yang didapatkannya untuk membuat simpulan jawaban terhadap pertanyaan yang ada • Mengambil kesimpulan tentang norma dan kebiasaan antar daerah di Indonesia, arti dan makna semangat & komitmen kebangsaan dalam merebut kemerdekaan dan mengisi kemerdekaan, pentingnya menjaga semangat & komitmen dalam memperkuat NKRI, serta semangat dan komitmen kebangsaan kolektif untuk memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam konteks kehidupan siswa sesuai peraturan yang berlaku, pentingnya sikap semangat & komitmen kebangsaan sebagai nilai yang dijunjung tinggi, serta makna korupsi, faktor penyebab terjadinya korupsi, solusi pencegahan dan pemberantasan korupsi, dan pentingnya hidup mandiri berdasarkan kesetaraan, kebersamaan, dan bertanggung jawab dalam memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). 			

No	Kompetensi Dasar	Indikator Pencapaian Kompetensi	Materi Pokok	Pembelajaran	Penilaian	Alokasi Waktu	Sumber Belajar
				<ul style="list-style-type: none"> Menentukan contoh sikap semangat & komitmen kebangsaan sebagai peserta didik, sebagai warga masyarakat, dan sebagai warga negara. Menentukan contoh sikap komitmen kebangsaan kolektif yang termasuk dalam pengembangan nilai-nilai antikorupsi <p>Mengomunikasikan</p> <ul style="list-style-type: none"> Menyusun laporan hasil telaah tentang semangat dan komitmen kebangsaan kolektif untuk memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam konteks kehidupan siswa. Menyajikan hasil telaah di kelas. Memajang hasil telaah (displai) di dinding kelas dengan bangga dan penuh rasa tanggung jawab. Mensimulasikan peran tokoh masyarakat akan pentingnya semangat dan komitmen kebangsaan untuk memperkuat NKRI 			

C. Pengintegrasian Nilai-nilai Antikorupsi dalam Pengembangan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)

Sekolah : SMP Indonesia

Mata Pelajaran : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)

Kelas/Semester : VIII/1 (satu)

Materi Pokok : Menelaah Pancasila sebagai Dasar Negara dan Pandangan Hidup Bangsa

Alokasi Waktu : 4 x Pertemuan (satu pertemuan = 40 menit)

Kompetensi Inti

1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya.
2. Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli (toleransi, gotong royong), santun, dan percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya.
3. Memahami dan menerapkan pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata.
4. Mengolah, menyaji, dan menalar dalam ranah konkret (menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, membuat) dan ranah abstrak (menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang/teori.

A. Tujuan Pembelajaran:

Setelah mengikuti proses pembelajaran, diharapkan peserta didik dapat menerima kebenaran Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa sebagai wujud syukur terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Melalui keyakinan tersebut selanjutnya peserta didik dapat mendeskripsikan dengan menelusuri, mengembangkan, dan menyajikan/mempresentasikan contoh-contoh sikap yang mencerminkan nilai-nilai luhur Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa dalam kehidupan sehari-hari.

B. Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian Kompetensi

Kompetensi Dasar	Indikator Pencapaian Kompetensi
1.1 Mensyukuri perwujudan Pancasila sebagai Dasar Negara yang merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa	1. Mensyukuri proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia yang diberkahi Allah Swt.
2.1 Menunjukkan sikap bangga akan tanah air sebagai perwujudan nilai-nilai Pancasila sebagai	2. Meyakini kebenaran Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa.
	3. Mendeskripsikan periodisasi berlakunya undang-undang dasar sebagai landasan yuridis konstitusional Pancasila sebagai dasar negara.
	4. Mencocokkan peristiwa kenegaraan yang terjadi sesuai periodisasi berlaku nya UUD dgn Pancasila sebagai dasar

Kompetensi Dasar	Indikator Pencapaian Kompetensi
<p>dasar negara</p> <p>3.1 Membandingkan antara peristiwa dan dinamika yang terjadi di masyarakat dengan praktik ideal Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa</p> <p>4.1 Merancang dan melakukan penelitian sederhana tentang peristiwa dan dinamika yang terjadi di masyarakat terkait penerapan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa</p>	<p>negara.</p> <p>5. Mendeskripsikan dinamika pelaksanaan nilai-nilai Pancasila sesuai periodisasi berlakunya UUD.</p> <p>6. <u>Menuliskan contoh pelaksanaan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa (kebijakan didasarkan pada kepentingan umum/ bersama, melaksanakan kebijakan secara jujur dan tanggung jawab.</u></p> <p>7. <u>Menunjukkan contoh perilaku sesuai nilai-nilai Pancasila (jujur, tidak diskriminatif/adil, melaksanakan musyawarah dalam menyelesaikan masalah/ kebersamaan, hemat dalam menggunakan SDA, & menjunjung tinggi kebenaran.</u></p> <p>8. <u>Mempresentasikan hasil telaah peristiwa dan pelaksanaan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa sesuai dinamika perkembangan jaman berdasarkan keberanian, mandiri dan bertanggung jawab.</u></p> <p>9. Menjelaskan arti pentingnya hidup mandiri, disiplin, kerja keras, dan bertanggung jawab dalam mewujudkan nilai-nilai Pancasila</p>

C. Materi Pembelajaran

1. Periodisasi berlakunya undang-undang dasar sebagai landasan yuridis konstitusional Pancasila sebagai dasar negara.
2. Pencocokkan peristiwa kenegaraan yang terjadi sesuai periodisasi berlakunya UUD dengan Pancasila sebagai dasar negara.
3. Dinamika pelaksanaan nilai-nilai Pancasila sesuai periodisasi berlakunya UUD.
4. Contoh pelaksanaan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa (kebijakan didasarkan pada kepentingan umum/bersama, melaksanakan kebijakan secara jujur dan tanggung jawab.
5. Contoh perilaku sesuai nilai-nilai Pancasila (jujur, tidak diskriminatif/adil, melaksanakan musyawarah dalam menyelesaikan masalah/kebersamaan, hemat dalam menggunakan SDA & menjunjung tinggi kebenaran.
6. Arti pentingnya hidup mandiri, disiplin, kerja keras, dan bertanggung jawab dalam mewujudkan nilai-nilai Pancasila

Pengembangan Materi Pembelajaran Terintegrasi Nilai-nilai Antikorupsi

Kita sebagai bangsa patut dan layak bersyukur atas anugerah Allah Swt. Tuhan Yang Maha Kuasa, karena dalam proses memerdekakan diri dari belenggu penjajah, pemimpin bangsa Indonesia mampu merumuskan nilai-nilai yang diyakini baik dan benar (yakni nilai-nilai Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan dan Keadilan) sebagai **dasar negara**. Apalagi nilai-nilai tersebut hidup dan terwujud dalam kehidupan nyata keseharian masyarakat dan bangsa, yang dalam terminologi politik disebut sebagai **pandangan hidup** (*way of life*) bangsa. Rasa syukur itu terasa lebih lagi karena tidak semua bangsa mampu melakukan sebagaimana yang bangsa Indonesia dapat raih. Oleh karena itu dapat dianggap hal yang wajar, kalau kita sebagai bangsa, memiliki kebanggaan atas semuanya. Rasa syukur dan kebanggaan itu sudah seharusnya kalau kita wujudkan dalam bentuk sikap dan tindakan yang positif, misalnya: berupaya memahami nilai-nilai Pancasila, baik

sebagai dasar negara maupun sebagai pandangan hidup bangsa, dan terutama berusaha mengamalkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari.

Memahami nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara mengandung makna bahwa, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila (nilai-nilai Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan dan Keadilan) merupakan landasan dan dasar di mana Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) diselenggarakan dan dikelola. Artinya, nilai-nilai Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan dan Keadilan tersebut dijadikan landasan dan dasar dalam merumuskan kebijakan & peraturan perundang-undangan, dijadikan landasan dan dasar dalam pelaksanaan kebijakan & peraturan perundang-undangan (penyelenggaraan pemerintahan), juga dijadikan landasan dan dasar dalam pengawasan dan evaluasi. Dengan demikian penyelenggaraan dan pengelolaan negara harus sesuai dan selaras serta tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai tersebut.

Hal ini sangat penting untuk dipahami dan dihayati oleh seluruh warga negara, terutama para penyelenggara negara. Adapun peserta didik, pentingnya memahami dan menghayati makna tersebut karena di tangan merekalah masa depan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara akan ditentukan. Oleh karena itu sejak dini mereka perlu dibekali dengan pemahaman dan penghayatan terhadap makna Pancasila, baik sebagai dasar negara maupun pandangan hidup bangsa sehingga sebagai calon pemimpin bangsa di masa datang, mereka dapat mewujudkan nilai-nilai Pancasila dalam kepemimpinannya.

Selain itu, nilai-nilai Pancasila oleh bangsa Indonesia juga diyakini kebenaran dan kebajikannya sehingga dijadikan pandangan hidup (*way of life*), dalam arti nilai-nilai Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan dan Keadilan itu dijadikan landasan dan dasar bagi bangsa Indonesia dalam memandang dan menjalani kehidupan.

Namun demikian kepada peserta didik juga perlu ditekankan bahwa, sebaik dan kebenaran setinggi apa pun suatu dasar negara, tanpa diimplementasikan atau diwujudkan dalam kenyataan hidup sehari-hari (berupa perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila), maka dasar negara itu hanya merupakan slogan yang tidak bermakna.

Dalam perjalanan dan dinamika kehidupan bangsa Indonesia sejak kemerdekaan, telah mengalami pasang surut dan perkembangan yang tidak selalu menggembirakan. Saat-saat tertentu bahkan menghadapi permasalahan dan tantangan yang sangat berat dan mengarah pada konflik dan disintegrasi bangsa.

Ketika UUD 1945 pertama kali berlaku (18 Agustus 1945-27 Desember 1949), di saat bangsa berjuang mempertahankan kemerdekaan dari upaya penjajahan kembali Belanda (yang didukung tentara Sekutu), terjadi pemberontakan PKI tahun 1948. Kemudian pada waktu berlaku UUD Sementara (17 Agustus 1950-5 Juli 1959) dengan demokrasi liberalnya, terjadi peristiwa DI-TII, pemberontakan Kahar Muzakar, Andi Azis, PRRI-Permesta, Republik Maluku Selatan (RMS).

Begitu kembali pada UUD 1945 melalui Dekrit Presiden 5 Juli 1959, berlangsung

demokrasi terpimpin yang diikuti oleh doktrin Nasional, Agama, Komunis (NASAKOM), pengkhianatan PKI terjadi lagi pada 30 September 1965. Era ini dikenal dengan nama Orde Lama. Memasuki Orde Baru (11 Maret 1966), bangsa Indonesia bertekad melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen. Tapi dalam perjalanannya, penyimpangan pun terjadi. Penyimpangan itu sedemikian rupa sehingga menimbulkan ketidakpuasan yang meluas dalam masyarakat. Pada tahun 1998, mahasiswa sebagai *moral force* mempelopori demo besar-besaran yang berakibat pada tumbangnya Presiden Soeharto yang kemudian dinamakan Orde Reformasi.

Sementara dinamika kehidupan yang berkembang pada masyarakat, tidak kalah hiruk pikuknya. Fenomena yang tampak menunjukkan bahwa nilai-nilai Pancasila semakin lama semakin pudar; apalagi yang terjadi di kota-kota besar. Pembunuhan, penculikan, pencurian, korupsi, penggunaan narkoba dan tindakan kejahatan lainnya seolah-olah menjadi peristiwa harian yang semakin memprihatinkan & mengkhawatirkan.

Kalau dinamika kehidupan bangsa dan peristiwa yang terjadi pada masyarakat sebagaimana secara singkat tersebut di atas kita cermati, maka ada benang merah yang dapat ditarik bahwa, peristiwa tersebut menggambarkan belum dipahami, dihayati dan diamalkannya nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Akibat yang terjadi adalah bangsa Indonesia belum dapat mewujudkan kehidupan seperti yang dicita-citakan, yaitu: masyarakat yang adil dan makmur.

Berdasarkan pemahaman ini, ke depan bangsa Indonesia harus berusaha untuk hidup dan menjalankan segala aktivitasnya sesuai dan selaras dengan nilai-nilai Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan dan Keadilan.

Agar sikap perilaku kita sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, maka sikap dan perilaku positif harus dikembangkan. Sikap perilaku tersebut antara lain: **jujur, sederhana, peduli, berbagi** dan **ikhlas** yang tercermin dalam perilaku sehari-hari sehingga tercipta suasana yang kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya karakter bangsa yang baik.

Sebaliknya sikap dan perilaku negatif harus dihindari dan di jauhi dalam kehidupan sehari-hari, misalnya: **ambisi pribadi, perbuatan yang menguntungkan kelompok tertentu, memberi janji-janji/iming-iming** agar pihak lain melanggar hukum, dan memberikan **perlakuan tidak adil** terhadap orang lain atau **tebang pilih**.

Perwujudannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara adalah berusaha semaksimal mungkin bersikap dan bertindak yang sesuai dan sejalan dengan **ajaran agama, bermanfaat bagi sesama** dan mengedepankan atau mengutamakan **kepentingan umum/ bersama** di atas kepentingan pribadi dan golongan serta berupaya untuk **terwujudnya kesejahteraan bersama**.

Dalam interaksi sosial, sikap yang ditunjukkan **tidak diskriminatif** (membeda-bedakan dalam memperlakukan dan memberikan layanan terhadap orang lain), **tidak mementingkan keluarga atau kelompoknya (nepotisme)** dan **tidak melakukan**

persekongkolan (konspirasi) dalam membuat keputusan yang merugikan banyak pihak (kolusi).

Di samping itu, berusaha mengembangkan sikap **mandiri, disiplin, kerja keras, hemat dan bertanggung jawab** dalam mengelola sumber daya dan aset-aset negara, dan sebaliknya **harus dihindari** sikap yang mengarah kepada **pemborosan, persaingan tidak sehat, dan suap.**

Dalam rangka mewujudkan sikap yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, harus **dihindari** keinginan untuk melakukan **penggelapan, pemalsuan dokumen, pemalsuan tanda tangan, plagiat, pencurian, penipuan, persekongkolan, perusakan, gratifikasi, menyontek dan menyalahi aturan.**

Tindakan diskriminatif, nepotisme, konspirasi, kolusi, penggelapan, pemalsuan dokumen, pemalsuan tanda tangan, plagiat, pencurian, penipuan perusakan, gratifikasi & menyontek merupakan tindakan koruptif. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa tindakan koruptif adalah tindakan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Sikap dan perilaku negatif termasuk di dalamnya korupsi, dapat merugikan serta mengancam kepentingan masyarakat, bangsa dan negara.

D. Metode Pembelajaran

1. Pendekatan : Saintifik
2. Model pembelajaran : *Discovery Learning* dan *Think Paire and Share*.
3. Metode : ceramah interaktif, diskusi, tanya jawab, penugasan, dan bermain peran/sosiodrama.

E. Media dan Alat Pembelajaran

5. Gambar Garuda Pancasila
6. Video/film pendek tentang Garuda Pancasila
7. Bahan tayang/slide terkait substansi materi pembelajaran
8. Lembar Kerja
9. LCD proyektor
10. Laptop.

F. Sumber Belajar:

1. Bahri Tamrin, 2008. *Modul Pendidikan Antikorupsi untuk kelas IX SMP/MTs*, Jakarta: Penerbit: KPK 2008.
2. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan SMP/MTs Kelas IX, Jakarta: Kemdikbud;
3. Priyanto, AT Sugeng, dkk dalam Buku Elektronik *Pendidikan Kewarganegaraan SMP/MTs*, Kelas IX Edisi 4 Jakarta: 2008 Penerbit: Depdiknas.
4. Tim Penyusun, *Model Pengintegrasian Pendidikan Antikorupsi pada Mata Pelajaran PPKn Kelas IX SMP/MTs. (Berdasarkan Kurikulum 2013)*, Jakarta: Ditjen Dikdas, 2015.
5. Tim Penyusun, *Pendidikan Kesadaran Berkonstitusi untuk SMP dan MTs*. Jakarta:

Sekjen dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2009;

6. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

G. Langkah-langkah Pembelajaran

Pertemuan 1

Tahap Kegiatan	Aktivitas Peserta Didik dan Guru
A. Kegiatan Pendahuluan (10 menit)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Guru mengecek kondisi lingkungan/kebersihan kelas 2. Guru mempersiapkan peserta didik untuk berdoa yang dipimpin oleh ketua kelas 3. Guru mengecek kehadiran peserta didik. 4. Guru memberi motivasi belajar bahwa pembelajaran saat ini bermanfaat bagi peserta didik, yakni bersyukur bahwa negara Indonesia memiliki Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa yang dijadikan pedoman bagi setiap warga negara dalam kehidupan sehari-hari. 5. Guru mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang mengaitkan pengetahuan sebelumnya dengan materi yang akan dipelajari 6. Guru menjelaskan tujuan pembelajaran yang akan dipelajari. 7. Guru menyampaikan cakupan materi dan penjelasan uraian kegiatan sesuai silabus.
B. Kegiatan Inti (90 menit).	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peserta didik dirangsang dengan cara diminta untuk mengamati tayangan video suasana orang menggambar Garuda yang diiringi dengan lagu Garuda Pancasila. (mengamati) 2. Secara individual peserta didik diminta menulis pertanyaan terkait materi pembelajaran (menanya), seperti: <ul style="list-style-type: none"> - Mengapa Pancasila menjadi dasar negara Indonesia dan pandangan hidup bangsa? - Mengapa Pancasila harus dipertahankan sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa? - Mengapa memahami nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa sangat penting bagi warga negara Indonesia? (masing-masing siswa membuat tiga pertanyaan) 3. Peserta didik dikelompokkan (4-5 orang) secara heterogen. 4. Setiap kelompok, mengidentifikasi dan menghimpun daftar pertanyaan dari seluruh anggota kelompok. (mengamati) 5. Peserta didik mencari sumber pembelajaran untuk menjawab pertanyaan (mengamati) 6. Peserta didik membaca sumber pembelajaran untuk menjawab pertanyaan (mengamati) 7. Peserta didik mendiskusikan dalam kelompok untuk mengumpulkan data dalam menjawab pertanyaan dalam Lembar Hasil Diskusi kelompok (mengumpulkan data) 8. Peserta didik mengklasifikasikan jawaban-jawaban menurut sumber data. (menalar) 9. Peserta didik mencermati kelengkapan jawaban. (mengamati) 10. Peserta didik menguji kembali jawaban dan dituliskan dalam lembar hasil diskusi kelompok. (menalar) 11. Peserta didik dalam kelompok memeriksa kebenaran jawaban. (menalar) 12. Peserta didik mempresentasikan hasil kerja kelompok, kelompok lain menanggapi presentasi jawaban (mengomunikasikan) 13. Peserta didik dengan dipandu guru mengklarifikasi kebenaran jawaban (mengomunikasikan)
C. Kegiatan Penutup (20 menit)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peserta didik dengan panduan guru menyimpulkan pembahasan tentang Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. 2. Peserta didik menerima bahwa Pancasila sebagai Dasar Negara merupakan anugerah dari Tuhan YME bagi bangsa Indonesia. 3. Peserta didik meyakini kebenaran Pancasila sebagai Dasar Negara dan pandangan hidup bangsa

Tahap Kegiatan	Aktivitas Peserta Didik dan Guru
	<ol style="list-style-type: none"> 4. Peserta didik memberikan umpan balik dengan mengajukan pertanyaan terhadap proses dan hasil pembelajaran tentang Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. 5. Guru menanyakan kembali tentang materi pembelajaran hari ini sebagai pelaksanaan post tes. 6. Peserta didik secara bersama-sama menyanyikan lagu “Garuda Pancasila” 7. Guru membagikan soal tes (post tes) tertulis kepada siswa 8. Pembelajaran diakhiri dengan do’a dan salam

Pertemuan 2

Tahap Kegiatan	Aktivitas Peserta Didik/Guru
A. Kegiatan Pendahuluan (10 menit)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Guru mengecek kondisi lingkungan/kebersihan kelas 2. Guru mempersiapkan peserta didik untuk berdoa yang dipimpin oleh ketua kelas 3. Guru mengecek kehadiran peserta didik. 4. Guru memberi motivasi belajar bahwa pembelajaran saat ini bermanfaat bagi peserta didik. Selanjutnya bersyukur bahwa bangsa Indonesia memiliki Pancasila yang mengandung nilai-nilai luhur bangsa Indonesia. 5. Guru mengajukan pertanyaan-pertanyaan berkaitan dengan materi pembelajaran. 6. Guru menjelaskan tujuan pembelajaran yang akan dipelajari. 7. Guru menyampaikan cakupan materi dan penjelasan uraian kegiatan sesuai silabus.
B. Kegiatan Inti (90 menit)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peserta didik diminta berkelompok secara heterogen (4 orang) untuk mengamati lembar informasi yang sudah disediakan guru. (<i>mengamati</i>) 2. Secara berkelompok peserta didik diminta mendiskusikan isi lembar informasi yang telah diamati. (<i>menalar</i>) 3. Secara berkelompok peserta didik diminta berdiskusi dalam menjawab pertanyaan (<i>menalar</i>) 4. Peserta didik mencermati kelengkapan jawaban (<i>mengamati</i>) 5. Peserta didik menguji kembali kebenaran jawaban (<i>menalar</i>) 6. Peserta didik menulis jawaban pada lembar hasil diskusi kelompok. 7. Peserta didik mempresentasikan hasil kerja kelompok, kelompok lain menanggapi presentasi jawaban (<i>mengkomunikasikan</i>) 8. Peserta didik dengan dipandu guru mengklarifikasi kebenaran jawaban
C. Kegiatan Penutup (20 menit)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peserta didik dengan panduan guru menyimpulkan pembahasan tentang ancaman dan usaha merubah Pancasila sebagai dasar negara dan dinamika nilai-nilai Pancasila sesuai perkembangan jaman 2. Peserta didik meyakini kekuatan Pancasila sebagai Dasar Negara 3. Peserta didik memahami nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. 4. Peserta didik memberikan umpan balik dengan mengajukan pertanyaan terhadap proses dan hasil pembelajaran tentang nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila. 5. Guru menanyakan kembali tentang materi pembelajaran hari ini sebagai pelaksanaan post tes secara lisan. 6. Guru memberikan tugas pekerjaan rumah sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> a. Tuliskan makna nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. b. <u>Tuliskan contoh sikap ikhlas dalam melaksanakan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa.</u> 7. Pembelajaran diakhiri dengan do’a dan salam.

Pertemuan 3

Tahap Kegiatan	Aktivitas Peserta Didik/Guru
A. Kegiatan Pendahuluan (10 menit)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Guru mengecek kondisi lingkungan/kebersihan kelas 2. Guru mempersiapkan peserta didik untuk berdoa yang dipimpin oleh ketua kelas 3. Guru mengecek kehadiran peserta didik. 4. Guru memberi motivasi belajar bahwa pembelajaran saat ini bermanfaat bagi peserta didik, yakni apabila berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila maka kehidupan akan menjadi tenang 5. Guru mengajukan pertanyaan-pertanyaan berkaitan penugasan minggu lalu. 6. Guru menjelaskan tujuan pembelajaran yang akan dipelajari. 7. Guru menyampaikan cakupan materi dan penjelasan uraian kegiatan sesuai silabus.
B. Kegiatan Inti (90 menit)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peserta didik diminta berpasangan (paire) dan setiap pasangan diminta membaca jawaban temannya (<i>mengamati</i>) 2. Setiap pasangan diminta untuk membuat pertanyaan-pertanyaan terkait dari apa yang dibaca, diamati kurang dipahami (<i>menanya</i>) 3. Pertanyaan dari peserta didik ditulis dipapan tulis untuk dicarikan pemecahannya. 4. Peserta didik diminta untuk mencari sumber pemecahan masalah yang diajukan oleh siswa sendiri (<i>mengumpulkan informasi/data</i>) 5. Peserta didik diminta untuk berpikir dan memecahkan permasalahan yang diajukan temannya terkait dengan pokok materi (<i>think paire</i> = berpikir berpasang-pasangan(<i>menalar</i>)) 6. Setiap pasangan memilih pasangan lain, sehingga kelompok menjadi empat orang, dan setiap anggota kelompok diberi kesempatan untuk menanggapi (<i>membuat jejaring</i>). 7. Setiap kelompok mencari kelompok lain, sehingga kelompok menjadi delapan orang, dan setiap anggota kelompok diberi kesempatan untuk menanggapi (<i>membuat jejaring</i>). 8. Setiap kelompok membuat laporan tertulis untuk dipresentasikan 9. Guru memimpin diskusi kelas dan setiap kelompok diberi kesempatan untuk menyampaikan hasil diskusinya (<i>mengkomunikasikan</i>). 10. Guru memberikan klarifikasi atau pelurusan agar tidak terjadi kesalahan konsep, prinsip, dan nilai-nilai
C. Kegiatan Penutup (20 menit)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peserta didik dengan panduan guru membuat rangkuman materi pembelajaran 2. Guru melakukan refleksi dengan cara meminta seorang atau beberapa peserta didik untuk mengemukakan pendapatnya terhadap pembelajaran hari ini, apakah manfaat bagi siswa belajar hari ini, apa yang yang dapat dilakukan siswa terkait topik hari ini. 3. Guru memberikan tugas kelompok yang dikerjakan di luar kelas, yaitu menyusun skenario/cerita yang ditampilkan minggu berikutnya tentang: <ol style="list-style-type: none"> a. <u>Kelompok 1: pentingnya kesetaraan sebagai upaya mewujudkan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa.</u> b. <u>Kelompok 2: pentingnya kebersamaan sebagai upaya mewujudkan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa.</u> c. <u>Kelompok 3: pentingnya hidup disiplin sebagai upaya mewujudkan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa.</u> d. <u>Kelompok 4: pentingnya hidup hemat sebagai upaya mewujudkan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa.</u> e. <u>Kelompok 5: sikap yang mencerminkan tanggung jawab sebagai wujud nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa.</u>

Tahap Kegiatan	Aktivitas Peserta Didik/Guru
	4. Pembelajaran diakhiri dengan do'a dan salam

Pertemuan 4

Tahap Kegiatan	Aktivitas Peserta Didik/Guru
A. Kegiatan Pendahuluan (10 menit)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Guru mengecek kondisi lingkungan/kebersihan kelas 2. Guru mempersiapkan peserta didik untuk berdoa yang dipimpin oleh ketua kelas 3. Guru mengecek kehadiran peserta didik. 4. Guru memberi motivasi belajar bahwa pembelajaran saat ini bermanfaat bagi peserta didik, yakni kehidupan yang aman, tentram, adil, dan sejahtera akan terwujud apabila nilai-nilai Pancasila diterapkan dalam kehidupan sehari-hari 5. Guru menanyakan kesiapan peserta didik berkaitan penugasan minggu lalu. 6. Guru menjelaskan tujuan pembelajaran yang akan dipelajari. 7. Guru menyampaikan cakupan materi dan penjelasan uraian kegiatan sesuai silabus.
B. Kegiatan Inti (90 menit)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peserta didik diminta berkelompok sesuai kelompok yang telah dibentuk pada minggu lalu 2. Setiap kelompok mempersiapkan laporan tertulisnya untuk diserahkan kepada guru. (menalar) 3. Setiap kelompok mempersiapkan anggotanya untuk menyajikan sosiodrama yang telah disusun. 4. Guru memimpin penyajian sosiodrama dan kelompok lain mengamati dan diberi kesempatan untuk menyampaikan pendapatnya (<i>mengkomunikasikan</i>). 5. Guru memberikan klarifikasi atau pelurusan agar tidak terjadi kesalahan konsep, prinsip, dan nilai-nilai
C. Kegiatan Penutup (20 menit)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peserta didik dengan panduan guru membuat rangkuman materi pembelajaran 2. Guru bersama peserta didik melakukan refleksi dengan cara meminta seorang atau beberapa peserta didik untuk mengemukakan pendapatnya terhadap pembelajaran hari ini, apakah manfaat bagi peserta didik belajar hari ini, apa yang yang dapat dilakukan siswa terkait topik hari ini. 3. Peserta didik diingatkan bahwa minggu depan ulangan/tes tentang materi yang telah dipelajari selama 4 x pertemuan 4. Pembelajaran diakhiri dengan do'a dan salam

H. Penilaian Hasil Pembelajaran

1. Teknik Penilaian.

a. Penilaian Proses

Penilaian proses dilakukan untuk menilai sikap dan keterampilan siswa pada saat pembelajaran. Teknik yang digunakan adalah:

- 1) pengamatan (untuk penilaian sikap), dan
- 2) *chek list* (untuk keterampilan).

b. Penilaian Hasil

Penilaian hasil belajar dilakukan untuk menilai hasil pembelajaran. Teknik yang digunakan adalah:

- 1) tes obyektif (untuk pengetahuan), dan
- 2) hasil Presentasi/kinerja dan ketrampilan (penilaian KD dari K-4)

2. Instrumen Penilaian, merupakan lampiran yang tidak terpisahkan dari RPP ini.
- a. Lembar pengamatan untuk penilaian sikap
 - b. Lembar pengamatan untuk penilaian keterampilan
 - c. Tes Obyektif untuk penilaian pengetahuan
 - d. Pemberian Tugas .

Jakarta, 08 Maret 2017

Mengetahui,
Kepala Sekolah,

Guru PPKn Kelas VIII,

(.....)

(.....)

INSTRUMEN PENILAIAN

A. Pengamatan Sikap

1. Penilaian Pengamatan Sikap dalam Proses “diskusi”.

Lembar penilaian sikap ini, diisi oleh guru yang melaksanakan proses pembelajaran untuk menilai sikap/perilaku yang ditampakkan oleh peserta didik dalam berdiskusi di kelas.

Petunjuk : Berikan nilai 1 (tidak), 2 (kurang), 3 (cukup), atau 4 (sangat) sesuai aspek yang dinilai pada kolom-kolom indikator sikap/perilaku yang diamati.

No	Nama Siswa	Indikator sikap/perilaku yang diamati					Nilai afektif
		Tanggung jawab	Keaktifan	Menghargai pendapat teman	Kedisiplinan	Kerja sama	
1	Angga	4	4	3	4	3	SB
2	Dhinda						
3	Frita						
	dst						

Catatan:

- Pemberian skor perilaku setiap indikator:

Indikator 1, apabila sangat tanggung jawab diberi skor 4
 apabila cukup tanggung jawab diberi skor 3
 apabila kurang tanggung jawab diberi skor 2
 apabila tidak tanggung jawab diberi skor 1

Indikator 2, apabila sangat aktif diberi skor 4
 apabila cukup aktif diberi skor 3
 apabila kurang aktif diberi skor 2
 apabila tidak aktif diberi skor 1

Indikator 3 : dst.

- Pengolahan skor menjadi nilai

Jumlah skor maksimum adalah 20

Jumlah skor minimum adalah 5

Nilai ideal adalah 100

Rumus perhitungan nilai = $\frac{\text{Jumlah perolehan skor siswa}}{\text{Jumlah skor maksimum}} \times \text{Nilai Ideal}$

- Pengkatagorian sikap/perilaku

Penentuan predikat (sangat baik, baik, cukup, dan kurang) didasarkan pada KKM sekolah masing-masing.

Contoh:

KKM = 75, maka cara penentuannya sebagai berikut:

$$100 - 75 = 25 : 3 = 8,3 \text{ dibulatkan menjadi } 8$$

Maka penentuan predikatnya adalah:

<75 = kurang

75 – 82 = cukup

83 – 90 = baik

91 – 100 = sangat baik

KKM = 65, maka cara penentuannya sebagai berikut:

$$100 - 65 = 35 : 3 = 11,8 \text{ dibulatkan menjadi } 12.$$

Maka penentuan predikatnya adalah:

< 65 = kurang

65 – 76 = cukup

77 – 88 = baik

89 – 100 = sangat baik

Misalnya: Nilai Angga, berdasarkan perolehan nilai dalam pengamatan diskusi di atas adalah 4,4,3,4,3, maka rumus menghitungnya sebagai berikut .

$$\frac{18(4+4+3+4+3)}{18} \times 100 = 90$$

Kategori nilai sikap Angga termasuk **BAIK**, jika menggunakan KKM 75. dan kategori nilai sikap Angga termasuk **SANGAT BAIK**, jika menggunakan KKM 65.

2. Penilaian Keterampilan dalam Proses Presentasi.

Lembar penilaian keterampilan ini diisi oleh peserta didik untuk menilai perilaku yang ditampakkan oleh temannya dalam presentasi di kelas (memberikan penilaian antar peserta didik).

Petunjuk : Berikan nilai 1 (kurang), 2 (cukup), 3 (baik), atau 4 (sangat baik) pada kolom- kolom sesuai hasil pengamatan.

No	Nama	Aspek Keterampilan yang Dinilai				Keterangan
		Mengajukan Pertanyaan	Menanggapi Pertanyaan	Menghargai pendapat teman	Runtut	
1	Dhinda	4	3	4	4	SB
2	Frita					
dst						

Catatan:

- Pemberian skor perilaku setiap indikator:

Indikator 1, apabila sangat baik dalam mengajukan pertanyaan skor 4

apabila baik dalam mengajukan pertanyaan skor 3

apabila cukup dalam mengajukan pertanyaan skor 2

apabila kurang baik dalam mengajukan pertanyaan skor 1

Indikator 2, apabila sangat baik dalam menanggapi pertanyaan skor 4

apabila baik dalam menanggapi pertanyaan skor	3
apabila cukup baik dalam menanggapi pertanyaan skor	2
apabila kurang baik dalam menanggapi pertanyaan skor	1

Indikator 3 : dst.

- Pengolahan skor menjadi nilai

Jumlah skor maksimum adalah 16

Jumlah skor minimum adalah 4

$$\text{Rumus penilaian} = \frac{\text{Jumlah perolehan skor siswa}}{\text{Jumlah skor maksimum}} \times \text{Nilai Ideal}$$

Nilai ideal = 100

- Pengkatagorian keterampilan.

Katagori keterampilan peserta didik:

Penentuan predikat (sangat baik, baik, cukup, dan kurang) didasarkan pada KKM sekolah masing-masing, seperti contoh pada penilaian pengamatan sikap/perilaku di atas.

Misalnya: Nilai Dhinda, berdasarkan perolehan nilai dalam pengamatan presentasi di atas adalah 4,3,4,4, maka rumus menghitungnya sebagai berikut .

$$\frac{15(4+3+4+4)}{16} \times 100 = 93,75$$

Katagori nilai keterampilan Dhinda termasuk **SANGAT BAIK**, dengan menggunakan KKM 75 maupun dengan menggunakan KKM 65.

3. Penilaian Sikap/Perilaku Jujur

Lembar penilaian sikap/perilaku jujur ini diisi oleh peserta didik untuk menilai sikap jujur temannya dalam satu kelas (memberikan penilaian antar siswa).

Petunjuk : Berilah tanda cek (v) pada kolom skor sesuai sikap jujur yang ditampilkan oleh temanmu, dengan kriteria sebagai berikut:

4 = apabila selalu melakukan sesuai pernyataan

3 = apabila sering melakukan sesuai pernyataan dan kadang-kadang tidak melakukan

2 = apabila kadang-kadang melakukan dan sering tidak melakukan

1 = apabila tidak pernah melakukan.

Lembar Pengamatan

Nama peserta didik yang dinilai :

Kelas :

Tanggal Pengamatan :

Materi Pokok :

No	Aspek Pengamatan	Skor			
		1	2	3	4
1	Tidak nyontek dalam mengerjakan ujian/ulangan/tugas				
2	Tidak melakukan plagiat (mengambil/menyalin karya orang lain tanpa menyebutkan sumber) dalam mengerjakan setiap tugas				
3	Mengamalkan sila-sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.				
4	Mengungkapkan perasaan terhadap sesuatu apa adanya				
5	Melaporkan data atau informasi apa adanya				
Jumlah Skor					

Jakarta, 08 Maret 2017

Penilai

(Nama peserta didik yang menilai)

Catatan:

- Pemberian skor sikap/perilaku setiap indikator, pengolahan skor menjadi nilai, dan pengkategorian sikap/perilaku sama seperti pada contoh penilaian sikap/perilaku dan penilaian keterampilan.

4. Penilaian Pengetahuan

Menggunakan tes tertulis bentuk uraian (obyektif)

Petunjuk: Jawablah pertanyaan di bawah dengan jelas dan benar!

- 1 Ungkapkan pernyataan rasa syukurmu sebagai bangsa Indonesia yang telah memiliki dasar negara Pancasila, dan apakah yang akan kamu lakukan sebagai bentuk rasa syukur tersebut?
- 2 Apakah makna gambar Garuda Pancasila? Uraikan secara terperinci!
- 3 Deskripsikan makna Pancasila sebagai dasar negara Indonesia?
- 4 Deskripsikan makna Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa?
- 5 Deskripsikan makna nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila!
- 6 Nilai-nilai apakah yang dapat kamu terapkan dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa?

- 7 Tuliskan contoh sikap ikhlas dalam melaksanakan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa
- 8 Mengapa sikap kebersamaan sangat penting dilakukan dalam mewujudkan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa.
- 9 Mengapa sikap hidup disiplin sangat penting dilakukan dalam mewujudkan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa.
- 10 Mengapa sikap tanggung jawab sangat penting dilakukan dalam mewujudkan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa.

Teknis Penilaian

1. Penskoran

a. Apabila peserta didik menjawab:

- 1) sangat sempurna diberi skor 5
- 2) sempurna diberi skor 4
- 3) cukup sempurna diberi skor 3
- 4) kurang sempurna diberi skor 2
- 5) tidak sempurna diberi skor 1

b. Skor minimal setiap soal adalah 1

c. Skor maksimal setiap soal adalah 5,

d. jumlah skor minimal seluruh soal = $10 \times 1 = 10$

e. Jumlah maksimal seluruh soal = $10 \times 5 = 50$

f. Nilai ideal 100.

2. Pengkatagorian Penilaian Pengetahuan.

Katagori keterampilan peserta didik:

Penentuan predikat (sangat baik, baik, cukup, dan kurang) didasarkan pada KKM sekolah masing-masing, seperti contoh pada penilaian pengamatan sikap/perilaku/keterampilan/kejujuran di atas.

Misalnya: Nilai Frita, berdasarkan perolehan nilai ulangan di atas adalah 5,4,3,4,5,5,4,5,4,5 maka rumus menghitungnya sebagai berikut:

$$\frac{46(5+4+5+4+5+5+4+5+4+5)}{50} \times 100 = 92$$

Katagori nilai pengetahuan Frita termasuk **SANGAT BAIK**, dengan menggunakan KKM 75 maupun dengan menggunakan KKM 65.

5. Penilaian Penugasan

Berdasarkan pengetahuan dan pengalaman belajar serta hasil pengamatan kalian di lingkungan sekolah dan masyarakat, diskusikan dengan teman kelompokmu untuk menyusun skenario/cerita yang ditampilkan pada pembelajaran minggu depan tentang:

- 1 Pentingnya kesetaraan sebagai upaya mewujudkan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa.

2. Pentingnya kebersamaan sebagai upaya mewujudkan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa.
3. Pentingnya hidup disiplin sebagai upaya mewujudkan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa.
4. Pentingnya hidup hemat sebagai upaya mewujudkan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa.
5. Sikap yang mencerminkan tanggung jawab sebagai wujud nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa.

Catatan

- Pemberian skor perilaku setiap indikator:
 1. Apabila tugas tertulis dan penampilan sangat baik skor 10
 2. Apabila tugas tertulis dan penampilan baik skor 8
 3. Apabila tugas tertulis dan penampilan cukup baik skor 6
 4. Apabila tugas tertulis dan penampilan kurang baik skor 4

- Pengolahan skor menjadi nilai

Jumlah skor maksimum adalah 10

Jumlah skor minimum adalah 4

$$\text{Rumus penilaian} = \frac{\text{Jumlah perolehan skor siswa}}{\text{Jumlah skor maksimum}} \times \text{Nilai Ideal}$$

Nilai ideal = 100

- Pengkategorian Nilai Tugas

Kategori nilai tugas peserta didik:

Penentuan predikat (sangat baik, baik, cukup, dan kurang) didasarkan pada KKM sekolah masing-masing, seperti contoh pada penilaian pengamatan sikap/perilaku di atas.

Misalnya: Nilai Nia, berdasarkan perolehan nilai tugas di atas adalah 8, maka rumus menghitungnya sebagai berikut .

$$\frac{8}{10} \times 100 = 80$$

Kategori nilai tugas Nia termasuk **CUKUP**, apabila menggunakan KKM 75, dan termasuk **BAIK** apabila menggunakan KKM 65.

- Nilai tugas merupakan bagian dari nilai pengetahuan, oleh karena itu dapat dijadikan pertimbangan dalam menentukan penilaian pengetahuan peserta didik.

B. Pengintegrasian Nilai-nilai Antikorupsi dalam Kegiatan Pengembangan Diri

1. Pengintegrasian Nilai-nilai Antikorupsi dalam Kegiatan Kokurikuler

- a. Pembelajaran Berbasis Portofolio.

Pembelajaran berbasis portofolio merupakan upaya agar peserta didik dapat

memperoleh pengalaman fisik terhadap obyek dalam pembelajaran, yaitu melibatkan atau mempertemukan peserta didik dengan obyek pembelajaran secara nyata. Selain itu, peserta didik juga memperoleh pengalaman atau terlibat secara mental, yakni mengkaitkan informasi awal yang telah diperoleh, selanjutnya memiliki kebebasan untuk menyusun kembali (*merekonstruksi*) informasi yang diperolehnya. Pembelajaran Berbasis Portofolio memberi keragaman sumber belajar dan keleluasaan kepada peserta didik memilih sumber belajar yang sesuai untuk dijadikan landasan dalam menyusun fenomena masyarakat/negara/dunia. Artinya sebagai upaya memandirikan peserta didik untuk belajar, berkolaborasi, membantu teman, bekerjasama, mengadakan pengamatan, dan penilaian diri untuk suatu refleksi yang akan mendorong mereka membangun pengetahuannya sendiri.

Pembelajaran berbasis portofolio membina peserta didik untuk :

- 1) Berlatih memadukan antara konsep yang diperoleh dari penjelasan guru atau dari buku/artikel/berita dengan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari;
- 2) Peserta didik diberi kesempatan untuk mencari informasi di luar kelas baik informasi yang sifatnya benda/bacaan, penglihatan atau obyek langsung (TV/radio/internet) maupun orang/pakar/tokoh;
- 3) Membuat alternatif untuk mengatasi topik/obyek yang dibahas;
- 4) Membuat suatu keputusan (sesuai kemampuannya) berkaitan dengan konsep yang telah dipelajarinya, dengan mempertimbangkan nilai-nilai yang ada di masyarakat;
- 5) Merumuskan langkah yang akan dilakukan untuk mengatasi masalah dan mencegah timbulnya masalah yang berkaitan dengan topik yang dibahas.

b. Penilaian Berbasis Portofolio

Portofolio penilaian (*Assesment*) merupakan kumpulan fakta/bukti berupa dokumen yang berisi tugas-tugas yang terorganisir secara sistematis dari peserta didik secara individual. Secara terperinci berupa kumpulan catatan pribadi/ individu yang berisi refleksi pengalaman belajar, seperti kegiatan peserta didik di dalam dan di luar kelas, kegiatan peserta didik sehari-hari yang berkaitan dengan pelajaran, membaca, menulis (segala sesuatu yang berkaitan dengan pelajaran), uneg-uneg peserta didik yang berkaitan dengan pelajaran, peristiwa yang dialami peserta didik berkaitan dengan pelajaran, prestasi peserta didik berkaitan dengan pelajaran, tanggapan guru dan sebagainya. Selain itu juga diartikan sebagai koleksi sistematis dari peserta didik dan guru untuk menguji proses dan prestasi belajar.

Portofolio sebagai penilaian merupakan perantara penilaian oleh siswa dan guru yang menggambarkan aktifitas dan proses yaitu mendorong siswa untuk berdialog, merencanakan tujuan, bekerja sama, memilih, membandingkan, berbagi pengetahuan, memper-timbangkan/merenungi, dan membuat keputusan. Dengan

demikian portofolio penilaian merupakan pembelajaran praktek (melakukan) yang mendorong adanya interaksi antar siswa, antara siswa dan guru, dan antara siswa dengan masyarakat dan alam sekitarnya.

Adapun contoh format portofolio penilaian untuk siswa dan guru adalah sebagai berikut.

FORMAT PORTOFOLIO PENILAIAN

N A M A :

KELAS :

NO.ABSEN :NILAI AKHIR :

ALAMAT :

NO.	AKTIFITAS PESERTA DIDIK	ASPEK PENILAIAN	TANGGAPAN GURU-PESERTA DIDIK	NILAI	TANDA TANGAN	
					SERDIK	GURU
1	<p>Deskripsi tentang hal-hal sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Mencari isu/masalah di masyarakat yang sangat penting dan membutuhkan penanganan dengan segera. ▪ Mencari sumber informasi berkaitan dengan isu/ masalah yang dibahas ▪ Mengobservasi isu/masalah secara langsung melalui berbagai sumber informasi ▪ Membuat laporan peneli-tian/ tugas ▪ Mempresentasikan hasil pencarian informasi 	<p><u>Signifikansi</u> : Seberapa besar tingkat kebermaknaan yang dilakukan peserta didik berkaitan dengan mata pelajaran.</p> <p><u>Pemahaman</u> : Seberapa besar tingkat pemahaman peserta didik terhadap tugas yang diberikan.</p> <p><u>Argumentasi</u> : Seberapa besar alasan yang dikemukakan peserta didik terhadap aktifitas yang dilakukan.</p> <p><u>Bermakna</u> : Seberapa besar manfaat aktifitas yang dilakukan peserta didik terhadap diri pribadi, keluarga dan masyarakat.</p> <p><u>Kejelasan</u> : Terorganisir dengan baik, tertulis dengan baik, mudah dipahami.</p> <p><u>Informasi</u> : Akurat, cukup dan penting.</p>				
2	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Membaca, mengkaji, mendiskusikan, dan mempresentasikan buku literature yang ditugaskan. ▪ Mengulas topik dalam jurnal pendidikan ▪ Membahas perkembangan IPTEK dalam pendidikan dan dalam kehidupan masyarakat beserta dampak positif dan 	<p><u>Pengatahuan/ Konsep/ Kognitif</u> : Seberapa besar pemahaman peserta didik terhadap materi pembelajaran.</p> <p><u>Pemahaman</u> : Seberapa besar kemampuan peserta didik untuk menjelaskan konsep/ informasi.</p> <p><u>Penerapan</u> : Seberapa besar kemampuan peserta didik untuk</p>				

NO.	AKTIFITAS PESERTA DIDIK	ASPEK PENILAIAN	TANGGAPAN GURU-PESERTA DIDIK	NILAI	TANDA TANGAN	
					SERDIK	GURU
	negatifnya.	<p>menggunakan atau menerapkan informasi yang telah dipelajari ke dalam situasi/ konteks yang berbeda.</p> <p><u>Analisis</u> : Seberapa besar kemampuan peserta didik dalam meng-identifikasi, memisahkan dan membedakan komponen, elemen fakta, konsep dan pendapat.</p> <p><u>Sintesis</u> : Seberapa besar kemampuan peserta didik dalam mengakombinasi-kan bagian/ elemen ke dalam suatu kesatuan/ struktur yang lebih besar.</p> <p><u>Evaluasi</u> : Seberapa besar kemampuan peserta didik dalam melakukan penilaian dan keputusan tentang nilai suatu gagasan dengan menggunakan criteria tertentu.</p>				
3	dst					

Catatan : Format yang dibuat hanya sebagai contoh, guru bersama siswa dapat membuat sesuai dengan situasi, kondisi, dan kemampuan serta lingkungan belajarnya.

1. Pengintegrasian Nilai-nilai Antikorupsi dalam Kegiatan Ekstrakurikuler

Pengintegrasian nilai-nilai antikorupsi pada kegiatan ekstrakurikuler disesuaikan dan mendukung visi dan misi sekolah serta membantu memperkuat branding sekolah dan evaluasi terhadap peraturan sekolah. Selain itu kegiatan ekstrakurikuler juga harus mendukung kompetensi abad 21 yakni Kritis dalam berpikir, Kreatif, Komunikatif, dan Kolaboratif. Jenis-jenis kegiatan ekstrakurikuler disesuaikan dengan minat dan bakat peserta didik yang dilakukan di bawah bimbingan guru atau pelatih dengan melibatkan orang tua dan masyarakat. Contoh kegiatan ekstrakurikuler adalah Kegiatan Keagamaan, Kegiatan Praktik Kantin Kejujuran, Pramuka, OSIS, Palang Merah Remaja (PMR), Paskibra, Kesenian, Bahasa dan Sastra, Kelompok Ilmiah Remaja (KIR), Jurnalistik, Olahraga, dsb.

Pelaksanaan kegiatan seperti tersebut di atas, mulai dari rencana, program kerja, anggaran, keputusan rapat, pelaksanaan kegiatan, dan hasil kegiatannya ditulis dalam

jurnal kegiatan individual pengurus atau panitia yang sewaktu-waktu dapat dicek oleh siapapun dan diumumkan secara tertulis dan terbuka di Papan Informasi Kegiatan. Tujuannya agar dapat dibaca oleh seluruh warga sekolah. Untuk itulah perlu ditumbuhkan rasa dedikasi, kejujuran, keikhlasan, rasa pengabdian, demokratis, dan objektif dalam setiap pribadi anggota serta pengurus organisasi kesiswaan.



Kantin Kejujuran dan Tulisan Ajakan Antikorupsi
SMAN 8 Bandung (doc.kemendikbud)



Pramuka dan Paskibra dapat membelajarkan dan
Mengimplementasikan Nilai-nilai Antikorupsi
(Sumber: Kemdikbud, 2016:10)

2. Pengintegrasian Nilai-nilai Antikorupsi dalam Kegiatan Pembiasaan dan Pembudayaan
Pelaksanaan pengintegrasian nilai-nilai Antikorupsi dalam Kegiatan Pembiasaan dan Pembudayaan perlu didahului dengan pesan tentang pentingnya bersikap dan bertindak antikorupsi dan ajakan untuk berperilaku antikorupsi sehingga dapat menumbuhkan pola pikir, sikap, dan tindakan/perilaku antikorupsi dalam diri seluruh warga sekolah. Pembiasaan dan pembudayaan tersebut dapat dilakukan secara rutin melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut.
 - a. Pengembangan literasi sekolah bisa dilakukan dengan Gerakan 15 Menit Membaca sebelum Pelajaran.
 - b. Sebelum menutup pelajaran terakhir peserta didik melakukan refleksi, menyanyikan lagu daerah, lagu antikorupsi, dan berdoa bersama.
 - c. Membiasakan Kerja tanpa Pamrih
 - d. Penerapan Reward and Punishment secara tegas
 - e. Ceramah kultum oleh seorang peserta didik yang mewakili kelasnya secara bergiliran pada pagi hari sebelum masuk jam pelajaran pertama untuk menanamkan sikap

kedisiplinan, tanggungjawab serta kejujuran

- f. Didirikannya “Bengkel Antikorupsi”, yang di dalamnya berisi hasil-hasil karya peserta didik yang terbaik tentang anti korupsi, seperti poster-poster anti korupsi, puisi, sajak, karikatur, cerpen, cergam, opini, dan ulasan anti korupsi.
- g. Didirikan “Posko Benda Hilang”, yaitu tempat penampungan barang-barang yang ditemukan peserta didik dengan dicatat ciri-ciri benda tersebut, dan apabila ada peserta didik yang merasa bahwa barang miliknya hilang bisa datang ke “Posko Benda Hilang”.
- h. Sholat dhuhur secara berjamaah antara guru-guru dan peserta didik pada saat istirahat kedua.
- i. Keteladanan para guru, diantaranya tepat waktu masuk kelas maupun ke luar kelas, bersikap adil kepada peserta didik, bersikap jujur kepada siswa diantaranya tepat secara keilmuan dalam memberikan materi pelajaran.
- j. Mengembangkan sikap kepedulian terhadap lingkungan yang ditunjukkan oleh keberanian peserta didik dalam menegur temannya bila berbuat salah/keliru/khilaf.

BAB V

PENUTUP

Buku Model Pengintegrasian Pendidikan Antikorupsi pada Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan merupakan panduan dan sarana bagi guru, kepala sekolah, pengawas sekolah, dan Dinas Pendidikan dalam mengimplementasikan pendidikan Antikorupsi di sekolah baik di dalam maupun di luar kelas.

Kedudukan guru sebagai motivator dan fasilitator dituntut memiliki kompetensi dalam merencanakan pembelajaran secara optimal berdasarkan kompetensi inti dan kompetensi dasar mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Untuk menghasilkan kegiatan pembelajaran yang baik dan benar diperlukan perencanaan pembelajaran yang baik dan benar pula sesuai peraturan yang berlaku dengan menggunakan pendekatan, strategi, metode, dan model pembelajaran yang kreatif dan inovatif.

Peraturan tersebut antara lain Peraturan Pemerintah RI Nomor No. 32 tahun 2013 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 20 Tahun 2016 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 21 Tahun 2016 tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 23 Tahun 2016 tentang Standar Penilaian Pendidikan, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 24 Tahun 2016 tentang Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar Pelajaran pada Kurikulum 2013 pada Pendidikan dasar dan Menengah.

Model pengintegrasian pendidikan antikorupsi pada mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan ini, diharapkan dapat meningkatkan kualitas perencanaan, pelaksanaan, serta penilaian proses dan hasil pembelajaran di dalam dan di luar kelas khususnya dalam penanaman nilai-nilai antikorupsi.

DAFTAR PUSTAKA

Allan Jhonson (Wikipedia, ensiklopedia bebas-Sosiologi 23/02/2008)

Bahri Tamrin, 2008. *Modul Pendidikan Antikorupsi untuk kelas 3 SMP/MTs*, Jakarta: Penerbit: KPK 2008.

Buchori, Muchtar, 2007, *Pendidikan Antikorupsi*, dimuat dalam Harian Kompas, 21 Februari 2007.

Center for Indonesian Civic Education (CICED),1999. *Workshop On The Development of Concepts and Concent of Civic Education for Indonesian Schools*. In collabrotion with : Center for Civic Education (CCE), Calabasas USA Bandung.

Faisal Djabar, 2008, Direktorat Pendidikan & Pelayanan Masyarakat, *Komisi pemberantasan Korupsi*)

Fajar, Arnie, 2009, *Portofolio dalam Pelajaran IPS*, Cetakan kelima, Bandung: PT Remaja Rosdakarya 2003, *Pengembangan Sikap Nasionalisme Melalui Pendekatan Sain Teknologi Masyarakat pada SMA Negeri 8 di Kota Bandung-Jawa Barat* (Tesis)

Kemendikbud, 2016, *Penguatan Pendidikan Karakter (PPK)*, Jakarta: Kemendikbud

Komisi Pemberantasan Korupsi, 2006, *Memahami untuk Membasmi: Buku Saku untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi.

Laila, Najmu, 2009, *Pemikir Penggerak*, Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Lickona, Thomas, 1991, *Educating for Character How Our Schools Can Teach Respect and Responsibility*, New York: Bantam Books.

Lukman Surya Saputra dan Wahyu Nugroho (kontributor naskah) *Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan/Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. SMP/MTs Kelas ix -- Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan , 2013.Hak Cipta © 2013 pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan*

Schumpeter, A. Joseph.,1947,*Capitalism, Socialism, and Democracy*. edisi ke-2, New York : Harper.

Von Aleman, Ulrich, 2004. *The unknown depths of political theory: the case for a multideimensional concept of corruption*. Crime, Law & Social Change (42). 25-34.

